

**ANALISIS PENGARUH INDEKS  
PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DAN PRODUK  
DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)  
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK**  
(Studi Kasus di Provinsi Nusa Tenggara Barat)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk menempuh ujian sarjana  
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**ZULCHAM TRIAWAN FAJRI**  
**NIM. 125030407111058**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**  
**JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS**  
**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN**  
**MALANG**  
**2017**

*“Man Jadda Wajada”*

“Siapa yang Bersungguh-sungguh, Akan Berhasil”

*“Man Shabara Zhafira”*

“Siapa yang Bersabar akan Beruntung”

*“Man Sara Darbi Ala Warshala”*

“Siapa yang Berjalan di Jalur-Nya, Akan Sampai”

*-Ahmad Fuadi, Trilogi Negeri 5 Menara-*

*Bekerja Dengan Ikhlas*

*-first quote from father-*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Untuk Bapak Muhammad Ikhsan dan Ibu Ramlah,  
Terimakasih telah menjadi orangtua yang hebat dengan doa, semangat  
dan nasehatnya*

*Untuk saudara saya, Deasny Muliati dan Hasrul Muliawan,  
Terimakasih untuk segala bantuan, contoh, waktu dan pelajarannya  
selama ini*

*Untuk Kakak Ipar, Sudihsah dan Rizky Ramadaniar Idrus untuk banyak  
bantuannya serta memberikan saya keponakan yang lucu dan penuh  
semangat, Dion, Zangki dan Arjuna*

*Untuk semua sahabat saya yang begitu banyak membantu serta  
menemani saya, terimakasih untuk Andriyana, Fahrul, Cindy, Silmi, Arif,  
Anto, Ryan, Rizqi, Febby, Jessica, Serly, Laily*

*Serta sahabat saya yang berpulang terlebih dahulu, Alm. Bagus Rahmat  
Priyambodo yang sejak awal kuliah sudah banyak sekali membantu serta  
berbagi dalam banyak hal, skripsi ini juga saya persembahkan untuk  
kamu di sana. Salam sahabat Soewie.*

## **TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Judul** : Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan  
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Penerimaan  
Pajak (Studi Kasus pada Provinsi Nusa Tenggara Barat)

**Disusun oleh** : Zulcham Triawan Fajri

**NIM** : 125030407111058

**Fakultas** : Ilmu Administrasi

**Jurusan** : Ilmu Administrasi Bisnis

**Konsentrasi** : Perpajakan

Malang, 30 November 2016

### **Komisi Pembimbing**

**Ketua**

**Anggota**



**Drs. Heru Sudilo. M.A**  
**NIP. 1959121019860110001**



**Rizki Yudhi Dewantara. S.Sos., MPA**  
**NIP. 19770502 200212 1 003**

## TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya pada:

Hari : Senin

Tanggal : 27 Februari 2017

Pukul : 10.00 WIB

Skripsi atas nama : Zulcham Triawan Fajri

Judul: : Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Regional Bruto (RDRB) Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus di Provinsi Nusa Tenggara Barat)

Dan dinyatakan LULUS

### Majelis Penguji

Ketua



Drs. Heru Susilo, M.A  
NIP. 1959121019860110001

Anggota



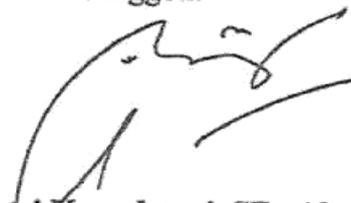
Rizki Yudhi Dewantara, S.Sos., MPA  
NIP. 197705022002121003

Anggota



Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si  
NIP. 196005151986011002

Anggota



Kartika Putri Kumalasari, SE., Ak., MSA  
NIP. 2014058711232001

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis tercantum dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur – unsur penjiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan serta proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 27 Januari 2017

Penvusun,



Zulnam Iriawan Fajri

## RINGKASAN

Zulcham Triawan Fajri, 2017, **Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus di Provinsi Nusa Tenggara Barat)**. Drs. Heru Susilo, M.A, Rizki Yudhi Dewantara, S.Sos., MPA.

---

Penerimaan pajak bagi negara maupun daerah merupakan suatu penerimaan yang sangat penting dalam menunjang kebutuhan suatu wilayah. Seiring waktu, disadari bahwa penerimaan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh sektor ekonomi saja, tetapi juga dipengaruhi oleh pembangunan dan pemberdayaan sumber daya manusia yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk melihat, mengetahui dan menganalisis sejauh mana pengaruh ekonomi daerah yang diukur berdasarkan PDRB dan tingkat pembangunan SDM yang diukur berdasarkan IPM terhadap penerimaan pajak provinsi NTB.

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder berupa tingkat IPM, jumlah PDRB dan jumlah penerimaan pajak di provinsi NTB. Dalam penelitian ini, populasi juga digunakan sebagai sampel yaitu penerimaan pajak provinsi NTB dalam kurun waktu 11 tahun dimulai tahun 2005-2015. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda yang diolah menggunakan program *SPSS for Windows*.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa IPM dan PDRB berpengaruh signifikan secara simultan dan parsial terhadap penerimaan pajak provinsi NTB. Koefisien determinasi pada penelitian ini ditemukan sebesar 0,718 yang artinya bahwa 71,8% penerimaan pajak dipengaruhi oleh IPM dan PDRB. Sedangkan sisanya sebesar 28,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa IPM memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap penerimaan pajak dibandingkan dengan PDRB. Oleh karena itu, disarankan kepada pemerintah provinsi NTB untuk menjaga serta meningkatkan IPM daerah serta meningkatkan PRDB dari sektor riil lain selain pertambangan agar penerimaan pajak dapat meningkat secara signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.

## SUMMARY

Zulcham Triawan Fajri, 2017, **Influence Analysis of the Human Development Index and Gross Regional Domestic Product Against Tax Receipts (Case Study in West Nusa Tenggara Province)**. Drs. Heru Susilo, M.A., Rizki Yudhi Dewantara, S. Sos., MPA.

---

Tax revenue for the state and local levels is an acceptance that is very important in supporting the needs of a region. Over time, it was realized that the tax revenue is not only influenced by the economic sector, but also influenced by the development and empowerment of its human resources. This study aims to see, know and analyze the extent of the influence of regional economy as measured by the GRDP and the level of human development as measured by the HDI of the NTB provincial tax revenue.

This research is a quantitative research uses secondary data HDI levels, the amount of the GRDP and the amount of tax revenue in NTB. In this study, the population is also used as a sample of the NTB provincial tax revenues over a period of 11 years, starting in 2005-2015. The data analysis in this research using descriptive analysis, classic assumption test and multiple linear regression analysis were processed using SPSS for Windows.

Results from the study showed that the HDI and GRDP significant influence simultaneously and partially to tax revenues NTB. The coefficient of determination in this study was found to be 0.718, which means that 71.8% of tax revenue is influenced by the HDI and the GRDP. While the remaining 28.2% is influenced by other variables outside variables.

Based on the results of this study found that the IPM has a greater influence on tax revenue compared to the GRDP. Therefore, it is suggested to the NTB provincial government to maintain and improve the HDI areas as well as improving GRDP of the real sector other than mining that tax revenues can be increased significantly from previous years.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Puji syukur yang sebesar-besarnya atas rahmat dan karunia yang selalu diberikan Allah SWT sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus di Provinsi Nusa Tenggara Barat)” ini.

Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Peneliti percaya bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, dorongan, bimbingan, semangat dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Ibu Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M. Si., selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, M. Si., selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Yuniadi Mayowan, S. Sos., M. AB., selaku Sekretaris Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

5. Bapak Drs. Heru Susilo, M.A., selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah dengan sabar meluangkan waktu memberikan bimbingan, arahan, dan masukan hingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Rizki Yudhi Dewantara, S.Sos., MPA., selaku Wakil Ketua Komisi Pembimbing yang senantiasa sabar meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan serta masukan hingga akhirnya skripsi ini selesai.
7. Bapak Ibu Dosen, Staf Pengajar, dan Karyawan di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Bapak dan Mama di rumah yang selalu sabar memberikan semangat, motivasi dan dukungan finansial serta doa yang tidak putus-putusnya sehingga peneliti diberi kekuatan dan kelancaran dalam menyusun skripsi ini hingga lulus.
9. Kk Cek, Kk Won, Brother Odon, K kiki, Dion, Zangki dan Juna sebagai keluarga terdekat yang memberikan semangat luar biasa untuk segera menyelesaikan skripsi ini serta keluarga-keluarga lain yang turut membantu.
10. Sahabat yang luar biasa setia, Andut dan Fahrul yang selama 17 tahun selalu ada. Serta sahabat Soewie yang benar-benar membantu dalam banyak hal, terimakasih kepada Cindy, Silmi, Arif, Anto, serta Almarhum Bagus.
11. Sahabat seperjuangan, Ryan dan Rizqi serta Feby, Hari, Jessica, Serly dan Laily, terimakasih atas bantuannya baik selama studi maupun dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Anak-anak BOMER yang selama di Malang memberikan banyak pengalaman serta keseruan. Terimakasih juga buat Mbak Sari dan Mas Ilham atas *sharing*nya.
13. Teman-teman perpajakan 2012 yang telah menemani peneliti di bangku perkuliahan dan mendukung peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
14. Serta seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak, memberikan kritik, saran, masukan dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu dukungan berupa saran dan masukan sangat peneliti butuhkan.akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membaca dan membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Malang, Maret 2017

Peneliti

## DAFTAR ISI

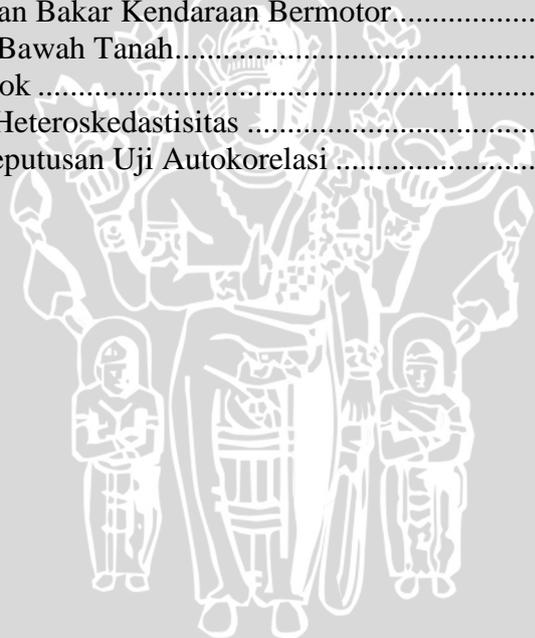
	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>MOTTO</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>TANDA PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	vi
<b>RINGKASAN</b> .....	vii
<b>SUMMARY</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Kontribusi Penelitian .....	11
E. Sistematika Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	14
A. Tinjauan Empiris .....	14
B. Tinjauan Teoritis .....	17
1. Pajak .....	17
a. Pengertian Pajak .....	17
b. Penerimaan Pajak .....	18
c. Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak .....	19
d. Fungsi Pajak .....	20
e. Jenis-jenis Pajak .....	21
f. Asas Pemungutan Pajak .....	23
g. Teori Pendukung Pemungutan Pajak .....	23
h. Pajak Daerah .....	24
i. Bagi Hasil Pajak Provinsi .....	27
2. Indeks Pembangunan Manusia .....	28
a. Pembangunan Manusia .....	28
b. Pengertian dan Pengukuran IPM .....	31
3. Produk Domestik Regional Bruto .....	36
a. Pengertian PDRB .....	36
b. Perhitungan PDRB .....	38
4. Hubungan Antar Variabel .....	40
a. Pengaruh IPM terhadap Penerimaan Pajak .....	40
b. Pengaruh PDRB terhadap Penerimaan Pajak .....	42

C. Kerangka Konseptual dan Hipotesis .....	43
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Jenis Data dan Sumber Data .....	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Populasi dan Sampel .....	47
F. Variabel dan Definisi Operasional Variabel .....	48
G. Teknik Analisis Data.....	50
1. Analisis Statistik Deskriptif .....	50
2. Uji Asumsi Klasik.....	51
3. Analisis Regresi Linier Berganda .....	55
4. Uji Hipotesis .....	55
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	58
1. Provinsi NTB .....	58
B. Gambaran Umum Sumber Data.....	63
1. Badan Pusast Statistik .....	63
2. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB .....	67
C. Statistik Deskriptif Data Penelitian.....	69
1. Indeks Pembangunan Manusia ( $X_1$ ).....	69
2. Produk Domestik Regional Bruto ( $X_2$ ).....	71
3. Penerimaan Pajak (Y) .....	72
D. Analisis Data Hasil Penelitian .....	76
1. Uji Asumsi Klasik.....	76
a) Uji Normalitas.....	76
b) Uji Heterokedastisitas .....	77
c) Uji Multikolonieritas.....	78
d) Uji Autokorelasi.....	79
2. Analisis Regresi Linier Berganda .....	82
a) Persamaan Regresi .....	82
b) Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	83
3. Pengujian Hipotesis .....	84
a) Uji F.....	84
b) Uji t .....	85
E. Pembahasan Hasil Penelitian .....	86
1. Pengaruh IPM Terhadap Penerimaan Pajak.....	86
2. Pengaruh PDRB Terhadap Penerimaan Pajak .....	90
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran .....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Konseptual .....	43
Gambar 2. Model Hipotesis .....	44
Gambar 3. Logo Provinsi NTB .....	58
Gambar 4. Peta Provinsi NTB.....	59
Gambar 5. Jumlah Angkatan Kerja Pada Berbagai Lapangan Kerja Umum Provinsi NTB Tahun 2015 .....	60
Gambar 6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2010-2014 .....	61
Gambar 7. Pertumbuhan IPM Provinsi NTB .....	70
Gambar 8. Pertumbuhan PDRB Provinsi NTB.....	71
Gambar 9. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Provinsi NTB .....	73
Gambar 10. Pajak Kendaraan Bermotor .....	73
Gambar 11. Pajak Air Permukaan.....	74
Gambar 12. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	74
Gambar 13. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.....	74
Gambar 14. Pajak Air Bawah Tanah.....	75
Gambar 15. Pajak Rokok .....	75
Gambar 16. Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	77
Gambar 17. Kaidah Keputusan Uji Autokorelasi .....	81



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Perbandingan Target dan Realisasi penerimaan Pajak 2010-2014	1
Tabel 2. Indeks Pembangunan Manusia Tingkat Regional/Provinsi .....	4
Tabel 3. Provinsi dengan Perkembangan Tercepat dalam Pembangunan Manusia.....	6
Tabel 4. PDRB Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah) .....	8
Tabel 5. Penelitian Terdahulu .....	15
Tabel 6. Indikator Perhitungan IPM Menurut UNDP.....	32
Tabel 7. Devinisi Operasional Variabel.....	49
Tabel 8. Hasil Keputusan Uji Autokorelasi .....	54
Tabel 9. Jumlah Penduduk Miskin di NTB 2010-2014 .....	62
Tabel 10. Persentase Buta Huruf di NTB 2010-2014 .....	63
Tabel 11. Rekapitulasi Hasil Deskriptif Data IPM .....	70
Tabel 12. Rekapitulasi Hasil Deskriptif Data PDRB .....	71
Tabel 13. Rekapitulasi Hasil Deskriptif Data Penerimaan Pajak.....	72
Tabel 14. Hasil Uji Normalitas .....	76
Tabel 15. Hasil Uji Multikolinieritas .....	78
Tabel 16. Hasil Uji Autokorelasi .....	81
Tabel 17. Persamaan Regresi .....	82
Tabel 18. Koefisien Korelasi dan Determinasi .....	83
Tabel 19. Hasil Uji F/Simultan .....	84
Tabel 20. Hasil Uji t/Parsial.....	85
Tabel 21. Indikator Pendidikan.....	88
Tabel 22. Indikator Kesehatan .....	88
Tabel 23. Indikator Kehidupan Layak .....	89

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia. Sebagai negara dengan status berkembang, Indonesia giat melakukan berbagai perbaikan dalam berbagai aspek untuk mengejar ketertinggalan dari negara lainnya. Dalam usaha melakukan perbaikan, negara maupun daerah memerlukan dana yang tidak sedikit. Kemandirian fiskal sangat penting peranannya dalam hal pembangunan.

Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat bergantung kepada sektor pajak. Pajak adalah salah satu sumber utama dalam penerimaan negara/daerah yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun dalam lima tahun terakhir, secara nasional penerimaan pajak selalu berada dibawah target penerimaan pajak. Perbandingan target dan realisasi dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 1. Perbandingan Target dan Realisasi penerimaan Pajak 2010-2014**  
(dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	%
2014	1246,1	1146,9	94,6
2013	1148	1007	93,81
2012	1016	980,5	96,4
2011	878,7	872,6	99,3
2010	661	649	98,1

Sumber: Kementerian Keuangan RI, diolah oleh peneliti (2016)

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak nasional tidak optimal. Ada beberapa alasan yang membuat hal tersebut bisa terjadi. Menurut Budiamanta dalam dayli (2013) tidak optimalnya penerimaan pajak dikarenakan tingginya *tax gap* atau selisih antara kewajiban pajak dengan pajak yang dibayar. Hal ini dikarenakan beberapa alasan yaitu pajak terutang yang tidak dibayar karena wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Selain itu laporan pajak dalam SPT lebih rendah daripada pajak yang seharusnya dibayar. Terakhir ialah karena potensi pajak yang hilang akibat wajib pajak menyampaikan SPT, namun tidak membayar pajak yang seharusnya terhutang.

Sa'diah (2014) juga mengungkapkan bahwa alasan tidak optimalnya penerimaan pajak salah satunya dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Direktorat Jendral Pajak. SDM yang dimiliki Indonesia hanya separuh dari SDM pajak di Jepang yang penduduknya hanya separuh dari penduduk Indonesia. Selain itu, masalah infrastruktur khususnya dalam Teknologi Informasi Indonesia merupakan penyebab lainnya yang membuat penerimaan tidak optimal dimana TI dianggap paling mampu menjangkau wajib Pajak dalam mengoptimalkan penerimaan.

Untuk membantu pemerintah pusat dalam mengelola perpajakan yang secara nasional kurang optimal, maka pemerintah memberikan keluasaan pada daerah dalam mengolah pajaknya sendiri yang disebut sebagai desentralisasi perpajakan. Hal ini dimaksudkan bahwa potensi-potensi pajak yang ada di daerah yang lebih paham dan mengerti adalah daerah itu sendiri. Hal ini

bertujuan agar pajak-pajak yang ada di daerah dapat dikelola sendiri oleh daerah sehingga tidak banyak bergantung pada pusat sehingga pemerintah pusat merasa harus memberikan daerah wewenang dalam memungut pajaknya sendiri.

Terdapat dua faktor yang dirasa penting untuk diperbaiki dan dimaksimalkan adalah faktor ekonomi dan manusia. Perbaikan dalam sektor manusia atau Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan sebagai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup dapat diusahakan melalui pemberdayaan dan pengembangan SDM yang dimiliki.

Pembangunan manusia memperlihatkan keseriusan negara dalam mengelola SDM yang dimiliki. Hal ini diasumsikan sebagai pembentukan modal manusia yang oleh Jhingan (2012:414) diartikan sebagai proses memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi dan politik suatu negara. Menurut Schulz dalam Jhingan (2012: 414) salah satu cara pengembangan SDM yaitu dengan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang mempengaruhi harapan hidup serta pendidikan yang diorganisasikan secara formal pada tingkat dasar, menengah dan tinggi.

Mendidik dan memfasilitasi SDM dengan berbagai kebutuhan dasar masyarakat akan membentuk masyarakat yang berpola pikir maju dan berkembang, dinamis, dan terdidik adalah modal besar untuk memajukan suatu negara/daerah. Indikator dalam menilai pembangunan manusia dapat diukur

berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) IPM adalah penjelasan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan yang merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM juga dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu negara/wilayah. IPM diukur berdasarkan tiga aspek yaitu umur yang panjang dan sehat, ilmu pengetahuan atau tingkat pendidikan dan kehidupan yang layak.

Berdasarkan data dari UNDP (*United Nations Development Programme*) pada tahun 2014 Indonesia berada dalam posisi 110 dari 187 negara di dunia berdasarkan tingkat IPM dengan nilai indeks 68,90. Posisi IPM Indonesia masih berada dalam kategori menengah dalam hal pembangunan manusia.

Dalam tingkat regional, capaian pembangunan manusia bervariasi. beberapa provinsi telah menunjukkan capaian pembangunan manusia tinggi, namun masih ada provinsi dengan tingkat pembangunan manusia rendah seperti yang dapat dilihat pada tabel IPM dibawah ini.

**Tabel 2. Indeks Pembangunan Manusia Tingkat Regional/Provinsi**

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
Aceh	67.09	67.45	67.81	68.30	68.81
Sumatera Utara	67.09	67.34	67.74	68.36	68.87
Sumatera Barat	67.25	67.81	68.36	68.91	69.36
Riau	68.65	68.90	69.15	69.91	70.33
Jambi	65.39	66.14	66.94	67.76	68.24
Sumatera Selatan	64.44	65.12	65.79	66.16	66.75

Lanjutan Tabel 2

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
Bengkulu	65.35	65.96	66.61	67.50	68.06
Lampung	63.71	64.20	64.87	65.73	66.42
Kep. Bangka Belitung	66.02	66.59	67.21	67.92	68.27
Kep. Riau	71.13	71.61	72.36	73.02	73.40
Dki Jakarta	76.31	76.98	77.53	78.08	78.39
Jawa Barat	66.15	66.67	67.32	68.25	68.80
Jawa Tengah	66.08	66.64	67.21	68.02	68.78
Di Yogyakarta	75.37	75.93	76.15	76.44	76.81
Jawa Timur	65.36	66.06	66.74	67.55	68.14
Banten	67.54	68.22	68.92	69.47	69.89
Bali	70.10	70.87	71.62	72.09	72.48
Nusa Tenggara Barat	61.16	62.14	62.98	63.76	64.31
Nusa Tenggara Timur	59.21	60.24	60.81	61.68	62.26
Kalimantan Barat	61.97	62.35	63.41	64.30	64.89
Kalimantan Tengah	65.96	66.38	66.66	67.41	67.77
Kalimantan Selatan	65.20	65.89	66.68	67.17	67.63
Kalimantan Timur	71.31	72.02	72.62	73.21	73.82
Kalimantan Utara	-	-	-	67.99	68.64
Sulawesi Utara	67.83	68.31	69.04	69.49	69.96
Sulawesi Tengah	63.29	64.27	65	65.79	66.43
Sulawesi Selatan	66	66.65	67.26	67.92	68.49
Sulawesi Tenggara	65.99	66.52	67.07	67.55	68.07
Gorontalo	62.65	63.48	64.16	64.70	65.17
Sulawesi Barat	59.74	60.63	61.01	61.53	62.24
Maluku	64.27	64.75	65.43	66.09	66.74
Maluku Utara	62.79	63.19	63.93	64.78	65.18
Papua Barat	59.60	59.90	60.30	60.91	61.28
Papua	54.45	55.01	55.55	56.25	56.75

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah peneliti (2016)

Tabel 2 diatas merupakan capaian IPM tiap provinsi. Data memperlihatkan bahwa status pembangunan manusia di kawasan barat

Indonesia lebih maju dibanding kawasan timur. Status pembangunan manusia tinggi di kawasan barat berjumlah 35,3% sedangkan di kawasan timur hanya 11,8% saja. Untuk status pembangunan manusia sedang terdapat 64,7% wilayah sedangkan di kawasan timur sejumlah 82,3%. Provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali dan Kalimantan Timur merupakan Provinsi dengan capaian status pembangunan manusia tinggi sedangkan Provinsi Papua menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia dengan status pembangunan manusia rendah.

Berdasarkan data IPM tiap provinsi dari tahun 2010-2014 diatas, provinsi yang mengalami laju pertumbuhan pembangunan manusia tercepat adalah provinsi dengan capaian pembangunan kategori menengah dengan peringkat IPM nasional masuk dalam 10 terbawah. Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat adalah dua provinsi dengan capaian laju pembangunan manusia tercepat selama kurun waktu tersebut. Capaian provinsi dengan pembangunan manusia tercepat tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3. Provinsi dengan Perkembangan Tercepat dalam Pembangunan Manusia**

Rangking	Provinsi	IPM (2014)	Peringkat IPM Nasional
1	Nusa Tenggara Timur	62,26	32
2	Nusa Tenggara Barat	64,31	30
3	Sulawesi Tengah	66,43	25
4	Kalimantan Barat	64,89	28
5	Jambi	68,24	18

Sumber: Data diolah Peneliti (2016)

Tabel 3 mengindikasikan bahwa daerah yang sekarang masih berada dalam status pembangunan manusia rendah maupun sedang memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bergerak lebih cepat dalam memperbaiki dan membangun SDM yang dimiliki. Jika dapat dimaksimalkan dengan baik, maka akan sangat membantu meningkatkan peringkat Indonesia secara global dalam hal pembangunan secara menyeluruh.

Selain sektor pembangunan manusia, faktor lain yang dapat dimaksimalkan dalam upaya peningkatan penyerapan dana dari sektor pajak adalah sektor ekonomi yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi negara/wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam menjalankan sistem pemerintahan. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi ditandai dengan jumlah produksi barang dan jasa yang meningkat (Rahardja dan Manurung, 2008: 129). Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi dapat dilihat berdasarkan jumlah Produk Domestik Bruto (PDB).

Dalam konsep Produk Domestik Bruto yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik dijelaskan bahwa PDB menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Selain itu PDB juga dapat menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Mengingat Indonesia terbagi dalam beberapa provinsi, maka besarnya Produk Domestik Bruto negara suatu sangat dipengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

PDRB merupakan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh masyarakat di suatu wilayah (*region*), baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Produk domestik di sini adalah semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut. Dengan kata lain, PDRB merupakan cerminan produktivitas suatu daerah/wilayah. Berikut ini disediakan tabel PDRB menurut provinsi yang termasuk migas di dalamnya.

**Tabel 4. PDRB Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)**

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Aceh</b>	101.545	108.218	114.552	121.971	130.448
<b>Sumatera Utara</b>	331.085	337.037	417.120	470.222	523.772
<b>Sumatera Barat</b>	105.018	118.674	131.436	146.885	167.040
<b>Riau</b>	338.578	485.649	558.493	607.499	679.692
<b>Jambi</b>	90.618	103.523	115.075	132.019	153.857
<b>Sumatera Selatan</b>	194.013	226.667	253.265	281.997	308.407
<b>Bengkulu</b>	28.353	32.200	36.208	40.460	45.235
<b>Lampung</b>	150.561	170.047	187.349	204.403	231.008
<b>Bangka Belitung</b>	35.562	40.849	45.400	50.394	56.390
<b>Kepulauan Riau</b>	111.224	126.914	144.841	163.122	182.916
<b>DKI Jakarta</b>	1.075.183	1.224.218	1.369.433	547.038	761.407
<b>Jawa Barat</b>	906.686	1.021.629	1.128.246	1.258.924	1.385.959
<b>Jawa Tengah</b>	623.225	629.562	754.259	832.954	925.633
<b>Yogyakarta</b>	64.679	71.370	77.248	84.925	93.450
<b>Jawa Timur</b>	990.649	1.120.577	1.249.767	382.435	1.540.697
<b>Banten</b>	271.465	306.174	338.225	380.173	432.764
<b>Bali</b>	93.749	104.612	117.987	134.339	156.448
<b>NTB</b>	70.123	68.177	69.002	73.605	81.671
<b>NTT</b>	43.847	48.815	54.893	61.325	68.603
<b>Kalimantan Barat</b>	86.066	96.727	106.959	118.623	131.933
<b>Kalimantan Tengah</b>	56.531	65.871	73.425	81.906	89.872
<b>Kalimantan Selatan</b>	85.305	98.781	106.725	115.876	131.594
<b>Kalimantan Timur</b>	418.212	515.191	550.736	518.735	519.930
<b>Kalimantan Utara</b>	-	-	-	52.575	59.080
<b>Sulawesi Utara</b>	51.721	57.344	63.875	71.079	80.623

Lanjutan Tabel 4

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
Sulawesi Tengah	51.751	60.716	69.638	79.820	90.256
Sulawesi Barat	17.184	20.189	22.626	25.249	29.392
Sulawesi Tenggara	48.401	55.759	64.694	71.041	78.620
Gorontalo	15.476	17.407	19.670	22.128	25.201
Maluku	18.429	21.368	24.662	27.834	31.733
Maluku Utara	14.984	17.078	19.340	21.440	24.054
Papua Barat	41.362	44.255	47.421	53.014	58.285
Papua	110.808	108.189	112.813	119.772	123.180
<b>Rata-rata</b>	207.575	235.118,35	263.918,22	229.805,69	293.723,4

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah peneliti (2016)

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan PDRB di sebagian besar wilayah dari tahun ke tahun semakin meningkat. Peningkatan PDRB di tiap wilayah mengindikasikan semakin produktifnya daerah-daerah dalam wilayah regional Indonesia. Suatu daerah/wilayah yang produktif akan menghasilkan produk ekonomi yang membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Peningkatan produktifitas dan ekonomi akan sejalan dengan peningkatan pengeluaran rumah tangga. Hal ini akan menjadi sumber yang sangat potensial bagi daerah/wilayah untuk menyerap pajak semaksimal mungkin melalui hasil kegiatan ekonomi di daerah/wilayah tersebut.

Dengan memaksimalkan peningkatan IPM dan PDRB diharapkan mampu mendongkrak pendapatan negara/daerah melalui sektor pajak. Hal itu dikarenakan semakin banyak barang dan jasa yang beredar yang berdampak pada peningkatan akan kebutuhan tenaga kerja. Semakin banyak masyarakat yang memiliki pekerjaan maka semakin banyak masyarakat yang memiliki penghasilan. Dengan membaiknya kualitas SDM yang diukur berdasarkan IPM

juga diharapkan diharapkan mampu membentuk masyarakat yang berpendidikan dan produktif sehingga semakin paham akan pentingnya perpajakan yang berakibat semakin berkurang penyelewengan dan penghindaran membayar pajak.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melihat pengaruh IPM dan PDRB terhadap penerimaan pajak. Untuk memperkecil wilayah penelitian, maka peneliti menggunakan studi kasus pada Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal ini didasari atas data yang menunjukkan bahwa Provinsi NTB merupakan 5 terbawah dalam capaian tingkat IPM di Indonesia namun merupakan salah satu provinsi dengan laju pertumbuhan pembangunan manusia tercepat selama kurun waktu 2010-2014. Selain itu nilai PDRB Provinsi NTB berada jauh di bawah rata-rata PDRB nasional. Atas hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2015)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, peneliti merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Indeks Pembangunan Manusia dan Produk Domestik Regional Bruto secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di Provinsi NTB?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh signifikan Indeks Pembangunan Manusia dan Produk Domestik Regional Bruto secara simultan dan parsial terhadap penerimaan pajak di Provinsi NTB.

### D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap:

1. Kontribusi Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memperbarui informasi atas penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini juga dilakukan dengan tujuan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang sosial dan perpajakan, khususnya yang berhubungan dengan pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan besarnya PDRB.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan memberikan kontribusi praktis kepada berbagai pihak, diantaranya adalah :

- a. Instansi atau Pemerintah Terkait

Memberikan informasi dan masukan kepada lembaga pemerintahan terkait dengan pembangunan manusia dan PDRB.

- b. Peneliti Selanjutnya

Menjadi acuan dan referensi dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya dibidang yang sama.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan berisi tentang latar belakang peneliti dalam melakukan penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dilakukannya penelitian, kontribusi yang diberikan atas penelitian yang dilakukan, serta sistematika penulisan penelitian dan hipotesis penelitian.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab tinjauan pustaka menjelaskan tentang teori yang digunakan oleh peneliti sebagai dasar untuk melakukan penelitian dan kajian-kajian lain berupa penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya sebagai acuan peneliti dalam melakukan penelitian.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab metode penelitian menjelaskan langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan. Bab ini berisi jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

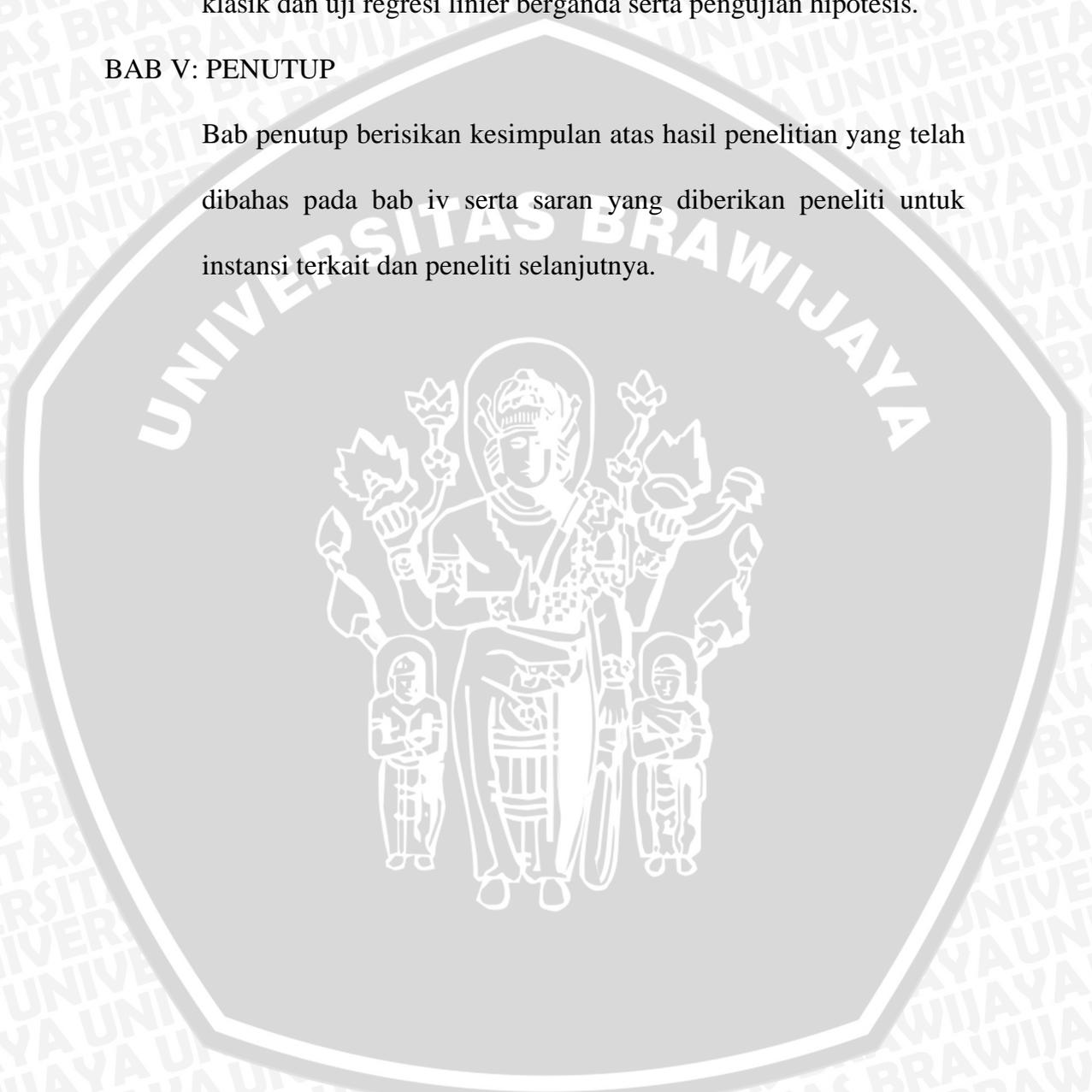
### **BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab hasil dan pembahasan menjelaskan menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan hasil penelitian

tersebut. Di dalam bab ini berisikan gambaran umum lokasi penelitian serta analisis data yang digunakan yaitu uji asumsi klasik dan uji regresi linier berganda serta pengujian hipotesis.

## BAB V: PENUTUP

Bab penutup berisikan kesimpulan atas hasil penelitian yang telah dibahas pada bab iv serta saran yang diberikan peneliti untuk instansi terkait dan peneliti selanjutnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Empiris

Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh:

1. Nalendra (2013)

Penelitian berjudul “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak” ini dilakukan oleh Enecep Herdiana Rachman Nalendra. Penelitian ini menggunakan variabel bebas PDRB (X1) dan Tingkat Inflasi (X2) dengan Penerimaan Pajak (Y) sebagai variabel terikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PDRB dan tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, sedangkan inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak.

2. Cholili (2014)

Penelitian berjudul “Analisis Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin” dilakukan oleh Fathkul Mufid Cholili. Penelitian ini menggunakan variabel bebas Pengangguran (X1), PDRB (X2), IPM (X3) dengan variabel terikat Jumlah Penduduk Miskin (Y). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengangguran, PDRB, dan IPM

terhadap kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa Pengangguran, PDRB, dan IPM secara simultan berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia.

### 3. Aprilia (2015)

Penelitian berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan” dilakukan oleh Anggi Aprilia. Penelitian ini menggunakan variabel bebas Pertumbuhan Ekonomi (X1), Tingkat Pengangguran Terbuka (X2), IPM (X3) dengan variabel terikat Tingkat Kemiskinan (Y). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat kemiskinan yang terjadi di Malang Raya. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Malang Raya, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan.

**Tabel 5. Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti (Tahun)	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Fathkul Mufid Cholili (2014)	Analisis Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Variabel : PDRB (X2) dan IPM (X3)	Variabel Berupa Pengangguran (X1) dan Jumlah Penduduk Miskin (Y)  Periode Penelitian tahun 2008-2012 sedangkan

		Terhadap Jumlah Penduduk Miskin		peneliti pada tahun 2005-2015  Studi kasus penelitian menggunakan 33 Provinsi di Indonesia sedangkan peneliti hanya menggunakan satu provinsi.
2	Anggi Aprilia (2015)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan	Variabel : Indeks Pembangunan manusia (X3) serta melihat pertumbuhan ekonomi	Variabel berupa Pertumbuhan Ekonomi (X1), Tingkat Pengangguran Terbuka (X2) dan Tingkat Kemiskinan (Y)  Sama-sama melihat pertumbuhan ekonomi, namun peneliti mengacu pada Produk Domestik Regional Bruto  Periode Penelitian tahun 2004-2013 sedangkan peneliti pada tahun 2005-2015
3	Encep Herdiana Rachman Nalendra (2013)	Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Tingkat Inflasi Terhadap	Variabel : PDRB (X1) dan Penerimaan Pajak (Y)	Variabel berupa Tingkat Inflasi ( X2)  Periode Penelitian

	Penerimaan Pajak	tahun 2008-2012 sedangkan peneliti pada tahun 2005- 2015
--	------------------	---

Sumber: Data diolah Peneliti, 2016

## B. Tinjauan Teoritis

### 1. Pajak

#### a. Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1KUP, definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Beberapa pendapat mengenai pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

#### a. Definisi pajak menurut Soemitro dalam Sutanto (2014: 2)

“Pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

#### b. Definisi pajak menurut Soemahamidjaja dalam Sutanto (2014: 2)

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam menguasai kesejahteraan umum”.

c. Definisi Pajak menurut Feldmann dalam Resmi (2013: 2)

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontrapresiasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

d. Definisi Pajak menurut Andriani dalam Sumarsan, (2015: 3)

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menalarkan pemerintahan”.

Berdasarkan definisi pajak yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki ciri-ciri sebagaimana yang dikemukakan oleh Susyanti dan Dahlan (2015: 1) sebagai berikut:

- a. Pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada Negara;
- b. Dipungut berdasarkan UU dan aturan pelaksanaannya, sehingga sanksinya tegas dan bisa dipaksakan;
- c. Tanpa kontra prestasi secara langsung;
- d. Dipungut oleh pemerintah pusat (negara) maupun oleh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota)
- e. Digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan demi kemakmuran rakyat.

Berdasarkan ciri-ciri diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kewajiban bagi masyarakat untuk ikut andil dalam pelaksanaan pemerintahan dengan membayar kepada negara/daerah agar terciptanya kemakmuran rakyat.

**b. Penerimaan Pajak**

Bagi negara maupun daerah, pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat penting. Timbul dan Imam (2002) dalam Nalendra (2013) menjelaskan

bahwa penerimaan negara dari pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan. Penerimaan dari hasil pajak atau yang disebut penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan (Suryadi dalam Nalendra:2013)

### c. Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak dipengaruhi oleh banyak faktor. Rahayu (2010:2007) menjelaskan faktor-faktor penerimaan pajak sebagai berikut:

- 1) Kepastian Perundang-undangan dalam bidang perpajakan dimana Undang-undang haruslah jelas, sederhana, dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan mengakibatkan pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Disisi lain pembayar pajak akan merasa bahwa system pemungutan akan berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayar pajak.
- 2) Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi.
- 3) Sistem administrasi perpajakan hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak.
- 4) Kualitas pelayanan yang dilakukan pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak.
- 5) Kesaradaran dan pemahaman warga negara, rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara, serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan semakin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.
- 6) Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektifitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil.

#### d. Fungsi Pajak

Secara umum fungsi pajak yaitu membiayai kebutuhan negara dalam pengeluaran yang bersifat rutin maupun untuk pembangunan. Secara khusus pajak memiliki fungsi *regulerend* dan *budgetair*. Priantara (2012:4) menjelaskan fungsi pajak adalah sebagai berikut:

##### a. Fungsi penerima (*Budgetair*)

Fungsi *Budgetair* yaitu fungsi pajak dimana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukan dana ke kas negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang mempunyai historis pertama kali timbul. Fungsi *budgetair* adalah fungsi yang letaknya di sektor publik dan pajak merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Upaya memasukan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara dilakukan melalui kebijakan intensifikasi dan ekstentifikasi. Kebijakan intensifikasi pajak berkaitan dengan upaya menggali potensi pajak yang belum atau kurang maksimal pengenaan pajaknya sedangkan kebijakan ekstentifikasi berkaitan dengan penambahan Wajib Pajak terdaftar.

##### b. Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Fungsi *regulerend* disebut juga fungsi tambahan yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Disebut sebagai fungsi tambahan karena hanya sebagai fungsi pelengkap dari fungsi utama pajak sebagai sumber pemasukan dan penerimaan dana bagi pemerintah. Untuk mencapai tujuan tertentu maka pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan untuk mencapai tujuan tersebut.

Salah satu fungsi *regulerend* pajak yaitu memberikan peluang kepada daerah untuk menjadi daerah otonom yang mandiri secara fiskal. Menurut Halim (2004), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah: (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah dimana sumber utama PAD adalah bersumber dari hasil pajak daerah. Hasil dari PAD digunakan daerah untuk membiayai belanja daerah yang terdiri dari belanja daerah.

Selain itu, pajak yang diterima pemerintah daerah juga dibagikan kepada Desa sebagai Dana Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 99 Ayat (1) yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati (Suryanto: 2014)

#### e. Jenis-jenis Pajak

Pajak dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai jenisnya. Resmi (2013:

7-8) mengelompokkan jenis pajak kedalam 3 kelompok, yaitu :

##### a. Menurut golongan

Menurut golongan, pajak dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu :

##### 1) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

##### 2) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara implisit maupun secara eksplisit (dimasukan dalam harga jual barang atau jasa).

Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas:

- 1) Penanggung jawab pajak, yaitu orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak;
- 2) Penanggung pajak, yaitu orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya;

- 3) Pemikul pajak, yaitu orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang maka pajaknya disebut pajak langsung, sedangkan jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang maka pajaknya disebut Pajak Tidak Langsung.

- b. Menurut sifat

Menurut sifat, pajak dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak Subjektif

Yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPH). Dalam PPH terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPH untuk orang pribadi tersebut memperhatikan status perkawinan WP, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya. Keadaan pribadi Wajib pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

- 2) Pajak Objektif

Yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (WP) maupun tempat tinggal.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

- c. Menurut lembaga pemungut Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh: PPh, PPN dan PPnBM.

- 2) Pajak Daerah

pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Kendaraan Bermotor, dan lain-lain.

#### f. Asas Pemungutan Pajak

Smith dalam Waluyo (2013 : 13) menjelaskan pemungutan pajak berdasar asas-asas sebagai berikut:

##### a. *Equality*

Pemungutan pajak harus adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuannya dalam membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

##### b. *Certainly*

Penetapan pajak ditentukan dengan peraturan yang jelas, yaitu undang-undang. Wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, dan batas waktu pembayaran.

##### c. *Convenience*

Waktu pdilakukannya pembayaran pajak sebaiknya sesuai dengan kondisi wajib pajak sehingga tidak menyulitkan wajib pajak. Sebagai contoh, pajak penghasilan dipotong setelah wajib pajak menerima penghasilan (*pay as you earn*).

##### d. *Economy*

Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung oleh wajib pajak.

#### g. Teori Pendukung Pemungutan Pajak

Resmi (2013: 5-6) memaparkan beberapa teori yang mendukung hak negara untuk melakukan pemungutan pajak dari rakyatnya sebagai berikut:

##### a. Teori asuransi

Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa, harta dan juga bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi (pertanggungan), untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut memerlukan pembayaran premi.

##### b. Teori kepentingan

Teori ini awalnya hanya memerhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada mereka.

c. Teori gaya pikul

Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwa pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut daya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasar besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang.

d. Teori kewajiban pajak mutlak (teori bakti)

Teori ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara maka timbullah hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang tidaklah berdiri sendiri, dengan tidak adanya persekutuan tidak akan ada individu. Oleh karena itu, persekutuan (yang menjelma menjadi negara) berhak atas satu dan yang lain. Akhirnya setiap orang menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda baktinya terhadap suatu negara dalam bentuk pembayaran pajak.

e. Teori asas gaya beli

Teori ini menyamakan pemungutan pajak dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara, dan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu. Penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak.

## **h. Pajak Daerah**

Pajak daerah Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 10 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah bersama dengan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembiayaan daerah. Pajak daerah dipungut berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan protensi daerah.

Jenis pajak di tiap daerah berbeda-beda menurut potensi yang ada di wilayah tersebut. Jenis-jenis pajak yang diatur dalam UU No.28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bisa tidak berlaku di suatu daerah bilamana tidak ada potensi yang ditemukan di wilayah tersebut. Atas dasar tersebut, Provinsi NTB mengeluarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dimana diatur sebelumnya berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tentang jenis Pajak Provinsi, yaitu:

a) Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya. Kendaraan bermotor juga termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang beroperasi di air. Hasil penerimaan PKB paling sedikit 10%, termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

BBNKB adalah pajak adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

Bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksudkan adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan oleh kendaraan bermotor.

d) Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan yang dimaksud adalah air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, yang terdapat di laut maupun di darat. Dasar pengenaan pajak air permukaan dilihat berdasarkan nilai perolehan air permukaan yang dihitung berdasarkan pertimbangan faktor-faktor berikut: jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air, volume air yang di ambil dan/atau dimanfaatkan, kualitas air, luar areal air, dan ingkat kerusakan lingkungan akibat pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

e) Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Rokok yang dimaksud meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Pajak rokok dikenakan pada konsumen rokok yang dipungut oleh instansi pemerintah yang kemudian di setor ke pemerintah daerah sesuai dengan proporsi jumlah penduduk. Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

### **i. Bagi Hasil Pajak Provinsi**

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Provinsi yang dipungut pemerintah provinsi sebagian diperuntukan bagi kabupateb/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen) setelah dipotong intensif;
- 2) Pembagian hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupateb/kota dibagi sebesar 40% berdasarkan pemerataan dan sebesar 60% berdasarkan potensi;
- 3) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen) setelah dipotong intensif;
- 4) Pembagian hasil penerimaan PBB-KB kepada Kabupaten/Kota adalah sebesar 50% berdasarkan pemerataan dan 50% berdasarkan potensi.
- 5) Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- 6) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen) setelah dipotong I ntensif;
- 7) Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80%.

Selanjutnya dana bagi hasil pajak provinsi tersebut digunakan untuk berbagai macam keperluan di kabupaten/kota provinsi sesuai dengan kebijakan pemerintah masing-masing daerah.

## 2. Indeks Pembangunan Manusia

### a. Pembangunan Manusia

Pembangunan secara garis besar menurut Siagian dalam Suryono (2004: 21) merupakan usaha atau serangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Dengan demikian, ide pokok pembangunan menurut Siagian: pembangunan merupakan suatu proses; pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan; pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan; pembangunan mengarah pada modernitas; modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat *multi dimensional*; proses dan kegiatan pembangunan ditujukan kepada usaha membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan.

Pembangunan manusia, menurut UNDP, didefinisikan sebagai suatu proses yang ditujukan untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk (*people*). Dalam konsep ini, penduduk (manusia) sebagai tujuan akhir (*the ultimate end*) dan upaya pembangunan itu sendiri sebagai sarana utama (*principal means*) dalam rangka mencapai tujuan tersebut.. Manusia adalah

kekayaan bangsa yang seutuhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan yang sederhana tetapi hal ini seringkali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang (*Human Development Report* 1990).

UNDP pada publikasinya edisi pertama tahun 1990 di halaman pembuka secara jelas menjelaskan bahwa arti penting pembangunan yang berpusat manusia dimana manusia adalah tujuan akhir, bukan sebagai alat pembangunan seperti halnya konsep Sumber Daya Manusia dimana manusia adalah alat untuk mencapai kesejahteraan pembangunan dan ekonomi.

Pada tahun 1990 UNDP (*United Nations Development Programme*) dalam laporannya "*Global Human Development Report*" memperkenalkan konsep "Pembangunan Manusia (*Human Development*)" sebagai paradigma baru model pembangunan. Menurut UNDP, pembangunan manusia dirumuskan sebagai perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging the choices of people*), yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah "perluasan pilihan" dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut. Pada saat yang sama pembangunan manusia dapat dilihat juga sebagai pembangunan (*formation*) kemampuan manusia melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan sekaligus sebagai pemanfaatan (*utilization*) kemampuan/ketrampilan mereka.

*Human Development Report* (1990: 10) dalam Katalog IPM tahun 2013 menjelaskan bahwa pembangunan manusia adalah proses perluasan pilihan masyarakat. Pada prinsipnya, pilihan manusia sangat banyak jumlahnya dan berubah setiap saat. Tetapi pada semua level pembangunan, ada tiga pilihan yang paling mendasar yaitu berumur panjang dan hidup sehat, untuk memperoleh pendidikan dan untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber kebutuhan agar hidup secara layak.

HDR menyatakan bahwa pembangunan manusia memiliki dua sisi. Pertama, pembentukan kapabilitas manusia seperti peningkatan kesehatan, pendidikan, dan kemampuan. Kedua, penggunaan kapabilitas yang mereka miliki seperti untuk menikmati waktu luang, untuk tujuan produktif atau aktif dalam kegiatan budaya, sosial dan urusan politik. Jika skala pembangunan manusia tidak seimbang, maka kemungkinan akan terjadi ketidak stabilan. Untuk mengukur keberhasilan dalam pembangunan manusia, maka ditetapkan suatu indikator komposit yang jelas untuk dapat menjelaskan tingkat pembangunan manusia yang ditetapkan berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dalam hal penerimaan negara/daerah khususnya penerimaan dari sektor pajak yang dianggap sebagai dasar pertembuhan ekonomi, penjelasan diatas diperkuat oleh teori yang disampaikan Kaldor dalam Gemmel (1998:380) bahwa hal yang sangat penting yang dapat dilakukan negara-negara terbelakang maupun berkembang dalam penerimaan pemerintah untuk mencapai kemajuan yang semakin cepat adalah dengan selalu meningkatkan

pelayanan yang tidak menghasilkan penerimaan yang diantaranya adalah pendidikan, kesehatan, sistem komunikasi dan sebagainya.

#### **b. Pengertian dan Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia**

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan indikator angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sedangkan untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity*). Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita.

Hasil IPM yang di publikasi memiliki beberapa manfaat penting, antara lain:

- 1) Merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk)
- 2) IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara
- 3) Di Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) (BPS: 2014)

IPM menggunakan beberapa indikator dalam perhitungan IPM, yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 6. Indikator Perhitungan IPM menurut UNDP**

Dimensi	Indikator
Umur Panjang dan Hidup Sehat	Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH)
Pengetahuan	Harapan Lama Sekolah (HLS) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Standar Hidup Layak	Kemampuan Daya Beli per Kapita
Agregasi	Rata-rata Geometrik

Sumber : [www.bps.co.id](http://www.bps.co.id)

Untuk menentukan besaran IPK, perlu dihitung indeks masing-masing indikator terlebih dahulu. Berikut adalah indikator penyusun IPM beserta perhitungan indeksnya :

#### **Angka Harapan Hidup saat Lahir**

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Penghitungan angka harapan hidup melalui pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Indeks harapan hidup dihitung dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah 20 tahun. Untuk menghitung indeks digunakan formula sebagai berikut :

$$I_{AHH} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{max} - AHH_{min}}$$

Keterangan :

$I_{AHH}$  = Indeks Angka Harapan Hidup

$AHH_{min}$  = Indeks Angka Harapan minimal

$AHH_{max}$  = Angka Harapan Hidup maksima

AHH = Angka Harapan Hidup

### **Tingkat Pendidikan**

Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dari dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) dan harapan lama sekolah (*expected years of schooling*). Pada proses pembentukan IPM, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah diberi bobot yang sama, kemudian penggabungan dari kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan yang merupakan salah satu komponen pembentuk IPM.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimum 15 tahun dan batas minimum 0 tahun.

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Batas maksimum untuk harapan lama sekolah sesuai kesepakatan UNDP adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya adalah 0 tahun. Untuk menghitung Indeks Pendidikan, mula-mula dihitung terlebih dahulu Indeks Harapan Lama Sekolah dan Indeks Rata-rata Lama Sekolah. Baru kemudian kedua indeks di total dan dibagi dua.

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}}$$

Keterangan :

$I_{HLS}$  = Indeks Harapan Lama Sekolah  
 $HLS_{min}$  = Harapan Lama Sekolah minimal  
 $HLS_{max}$  = Harapan Lama Sekolah maksimal  
 $HLS$  = Harapan Lama Sekolah

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}}$$

Keterangan :

$I_{RLS}$  = Indeks Rata-rata Lama Sekolah  
 $RLS_{min}$  = Rata-rata Lama Sekolah minimal  
 $RLS_{max}$  = Rata-rata Lama Sekolah maksimal  
 $RLS$  = Rata-rata Lama Sekolah

$$I_{pengetahuan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

### Standar Hidup Layak

Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran perkapita *rill* yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purchasing power*

parity), dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten/kota (BPS:2014).

Penghitungan paritas daya beli menggunakan 96 komoditas yang terdiri dari 66 komoditas berupa makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode yang digunakan untuk menghitung paritas daya beli adalah Metode Rao. Rumus Metode Rao sebagai berikut:

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left( \frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{1/m}$$

Keterangan:

- $PPP_j$  = paritas daya beli di wilayah j  
 $P_{ij}$  = harga komoditas i di wilayah kabupaten/kota  
 $P_{ik}$  = harga komoditas i di Ibukota negara  
 $M$  = jumlah komoditas

Batas maksimum pengeluaran per kapita adalah sebesar Rp 26.572.352 sementara batas minimumnya adalah Rp 1.007.436. Untuk menghitung Indeks

Pengeluaran digunakan rumus sebagai berikut :

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$$

Catatan :

- 1) Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 yaitu di Tolikara, Papua
- 2) Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga tahun 2025 yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025 (BPS: 2014)

Selanjutnya nilai IPM dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} + I_{\text{pendidikan}} + I_{\text{pengeluaran}}}$$

Setelah hasil IPM didapat, maka capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia (BPS 2014). Kelompok pembangunan manusia tersebut adalah Kelompok sangat tinggi ( $IPM \geq 80$ ), tinggi ( $70 \leq IPM < 80$ ), sedang ( $60 \leq IPM < 70$ ) dan rendah ( $IPM < 60$ ).

### 3. Produk Domestik Regional Bruto

#### a. Pengertian PDRB

Rahardja dan Manulung (2008: 22) menjelaskan bahwa Produk Domestik Bruto adalah alat untuk menghitung hasil produksi suatu perekonomian tanpa memperhatikan siapa pemilik faktor produksi tersebut. Semua faktor produksi yang berlokasi dalam perekonomian tersebut *output*-nya diperhitungkan dalam PDB. Dengan kata lain PDB adalah tolak ukur produktivitas suatu negara. Lebih jelas Todaro dan Smith (2011: 53) menjelaskan bahwa Produk Domestik Bruto mengukur jumlah nilai akhir *output* yang dihasilkan aktivitas perekonomian, baik yang dilakukan oleh warga negara maupun oleh non-warga negara (warga asing).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator dalam melihat keadaan perekonomian suatu daerah dalam satu waktu tertentu. PDRB mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki yang merupakan jumlah akhir dari nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh satu unit ekonomi pada suatu daerah.

Menurut Bambang dan Aristanti dalam Nalendra (2013) PDRB merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu masyarakat yang tinggal di suatu daerah (*region*). Hal ini berarti PDRB tidak melihat siapa dan darimana unit yang memproduksi barang atau jasa tersebut asalkan beroperasi di daerah itu, maka hasil produksinya merupakan *input* dari PDRB daerah tersebut.

Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai tambah yang mampu diciptakan oleh berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Istilah PDRB merupakan gabungan dari empat kata yaitu: *Pertama*; Produk, artinya seluruh nilai produksi baik barang maupun jasa, *Kedua*; Domestik, artinya perhitungan nilai produksi yang dihasilkan hanya oleh faktor-faktor produksi yang berada dalam wilayah domestik, *Ketiga*; Regional, artinya perhitungan nilai produksi yang dihasilkan hanya oleh penduduk tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang digunakan berada di dalam maupun luar wilayah domestik, dan *Keempat*; Bruto, maksudnya adalah perhitungan nilai produksi kotor karena masih mengandung biaya penyusutan.

Istilah PDRB diatas juga sejalan dengan pengertian produk domestik oleh Badan Pusat Statistik, dimana dijelaskan bahwa produk domestik adalah semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik daerah yang bersangkutan. Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan domestik. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian dari faktor produksi yang

digunakan dalam kegiatan produksi di suatu daerah berasal dari daerah lain atau dari luar negeri, demikian juga sebaliknya faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk daerah tersebut ikut serta dalam proses produksi di daerah lain atau di luar negeri. Hal ini menyebabkan nilai produk domestik yang timbul di suatu daerah tidak sama dengan pendapatan yang diterima penduduk daerah tersebut. Dengan adanya arus pendapatan yang mengalir antar daerah ini (termasuk juga dari dan ke luar negeri) yang pada umumnya berupa upah/gaji, bunga, deviden dan keuntungan maka timbul perbedaan antara produk domestik dan produk regional.

#### **b. Perhitungan PDRB**

Gresia (2010) menjelaskan Produk Domestik Regional Bruto dapat dihitung dalam dua cara, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah.

Perhitungan PDRB juga dapat diperoleh melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran.

Penjelasan tentang ketiga pendekatan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Menurut Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi Sembilan sektor atau lapangan usaha yaitu :

- a. Pertanian , Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan;
  - b. Pertambangan dan Penggalian;
  - c. Industri Pengolahan;
  - d. Listrik, Gas, dan Air Bersih;
  - e. Konstruksi;
  - f. Perdagangan, Hotel dan Restoran;
  - g. Pengangkutan dan Komunikasi;
  - h. Keuangan, Jasa Real Estate, dan Jasa Keuangan;
  - i. Jasa-jasa ( termasuk jasa pemerintahan).
- 2) Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari :

- a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Pengeluaran Swasta Nirlaba;
  - b. Konsumsi Pemerintah
  - c. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto;
  - d. Perubahan Investori; dan
  - e. Ekspor Neto (Ekspor dikurangi Impor).
- 3) Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang turut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan. Semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto ( pajak tidak langsung dikurangi subsidi).

#### **4. Hubungan Antar Variabel**

##### **a. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Penerimaan Pajak**

Konsep pembangunan manusia adalah manusia sebagai kekayaan bangsa seutuhnya. Penduduk adalah tujuan akhir dari pembangunan bangsa, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia adalah indikator dalam melihat sejauh mana kesuksesan dalam pembangunan manusia itu sendiri. Memperbaiki, mendidik dan mensejahterakan aset kekayaan bangsa adalah modal untuk menjadi negara yang besar. Fokus dalam peningkatan IPM adalah perbaikan dalam tiga dimensi pokok pembentuk IPM yaitu peningkatan pengetahuan penduduk, pengusaha dalam pencapaian umur panjang dan hidup yang sehat serta peningkatan akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan sehingga manusia/penduduk dapat hidup secara layak.

Setiap dimensi IPM memiliki hubungan yang erat dengan dengan tingkat produktifitas masyarakat. Londong dalam World Bank (2005:255) menjelaskan bahwa tingkat keterampilan dan kesehatan masyarakat

mempengaruhi kemampuan mereka untuk turut berpartisipasi dalam masyarakat, keluar dari kemiskinan, mengatasi resiko-resiko ekonomi, serta memberikan kontribusinya kepada peningkatan produktivitas dan pertumbuhan. Pendidikan juga akan memperbaiki kesehatan melalui tingkat kesadaran yang lebih tinggi dan akses terhadap informasi sehingga kesadaran akan membayar pajak diharapkan akan ikut meningkat.

Penelitian Cholili (2014) juga menyebutkan bahwa dengan masyarakat yang sehat dan berpendidikan maka produktifitas masyarakat akan meningkat pula pengeluaran untuk konsumsinya. Hal ini ditegaskan oleh Todaro dan Smith ( 2011: 59) bahwa Indikator penyusunan IPM yaitu kesehatan dan pendidikan adalah input (masukan) bagi fungsi produksi nasional dalam dalam perannya sebagai komponen modal manusia (*human capital*), yang berarti investasi produktif dalam sumber daya manusia. Peningkatan pendapatan akan meningkatkan pengeluaran yang akan berimbas pula pada peningkatan penyerapan dalam sektor perpajakan.

Todaro dan Smith (2011: 61) menekankan hal ini bahwa Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) memiliki kecenderungan kuat sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita yang memungkinkan negara dapat berinfestasi lebih banyak dalam bidang kesehatan dan pendidikan yang berarti tambahan modal manusia ini mempertinggi produktivitas.

Dengan peningkatan pendapatan individu dan produktifitas maka penyerapan pajak juga akan meningkat yang disebabkan oleh tingginya intensitas perekonomian di wilayah tersebut. Hal tersebut juga ditegaskan

berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cholili(2014) dimana IPM mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Menurunnya kemiskinan saat IPM meningkat merupakan indikasi tingginya kualitas sumber daya manusia yang akan berakibat pada meningkatnya produktifitas kerja penduduk yang akan berakibat pada meningkatnya pendapatan. Berdasarkan uraian diatas maka disimpulkan bahwa IPM berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

**b. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Penerimaan Pajak**

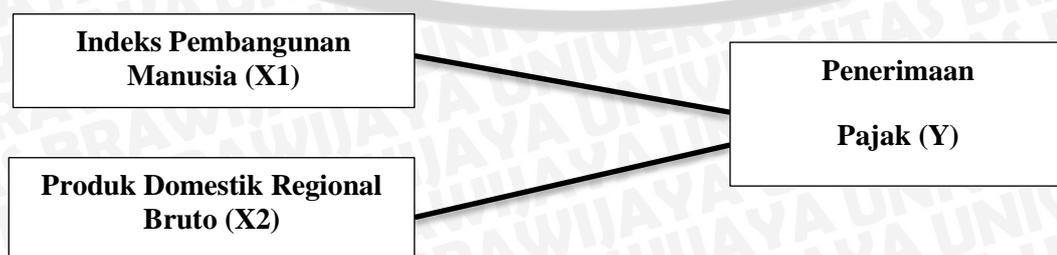
Selain untuk mengetahui nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu masyarakat yang tinggal di suatu daerah (*region*), PDRB juga berguna untuk melihat sebesar apa pembangunan dan perkembangan perekonomian suatu wilayah. Sukirno (2010: 10) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Peningkatan perekonomian akan memerikan peningkatan pendapatan kepada masyarakat sehingga semakin besar pengeluaran dan penerimaan pajak dari uang yang dibelanjakan masyarakat akan semakin meningkat. Hal ini dipertegas lagi oleh Menurut Siregar dan Wahyuniarti dalam Cholili (2014) yang menyatakan bahwa ketika perekonomian berkembang di suatu wilayah (negara atau kawasan tertentu yang lebih kecil) terdapat lebih banyak pendapatan untuk dibelanjakan dan memiliki distribusi pendapatan yang baik di antara wilayah tersebut. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan

banyaknya pengeluaran akan meningkatkan peluang yang tinggi dalam penyerapan pendapatan negara melalui sektor perpajakan. Penjelasan tersebut juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nalendra (2013) yang menyatakan PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Hal ini dijelaskan oleh Nurcholis (2005) dalam Nalendra (2013) bahwa jika PDRB suatu wilayah meingkat maka kemampuan daerah dalam membayar pajak (ability to pay) juga akan meningkat. Hal ini kan meningkatkan daya pajaknya agar penerimaan pajak meningkat. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak.

### C. Kerangka Konseptual dan Hipotesis

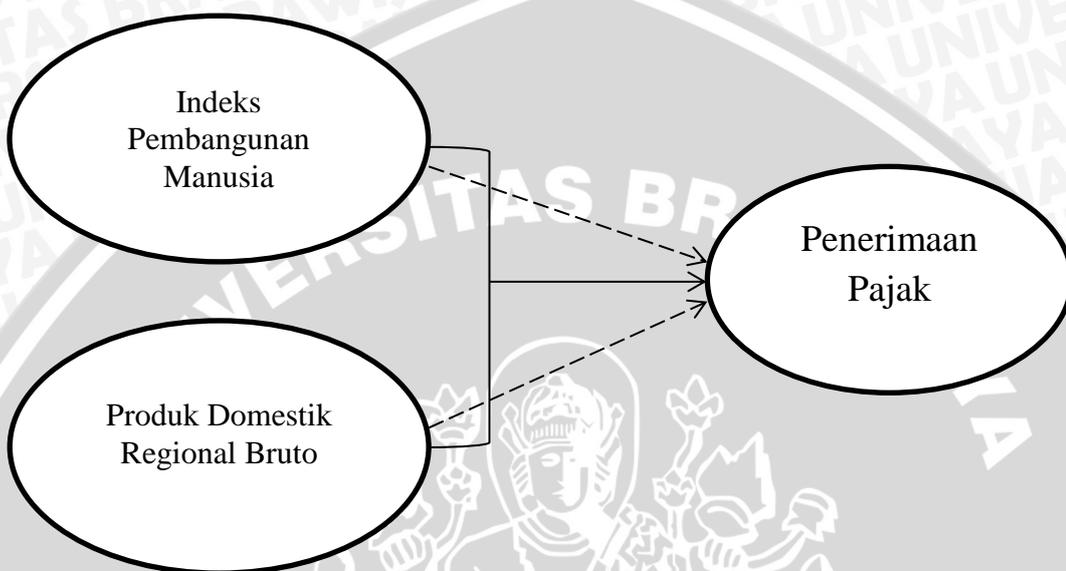
Menurut Arikunto dalam Zuriah (2005: 162) Hipotesis didefinisikan sebagai alternatif dugaan jawaban yang dibuat oleh peneliti bagi problematika yang diajukan dalam penelitiannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian.

Berdasarkan teori-teori yang telah dijabarkan, kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini tercermin dalam gambar berikut:



**Gambar 1. Kerangka Konseptual**  
*Sumber: Diolah oleh Peneliti(2016)*

Selanjutnya peneliti menguraikan kerangka konseptual tersebut menjadi lebih spesifik dalam bentuk model hipotesis yang tercermin dalam gambar berikut :



**Gambar 2. Model Hipotesis**

Keterangan:

—————→ : Simultan

- - - - -→ : Parsial

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia (X1) dan Produk Domestik Regional Bruto (X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak (Y).
2. Indeks Pembangunan Manusia (X1) dan Produk Domestik Regional Bruto (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak (Y).

### BAB III

## METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang bermaksud untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap tingkat penerimaan pajak, maka jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif.

Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan pengambilan keputusan manajerial yang didasarkan atas penggunaan metode-metode ilmiah dengan menggunakan analisis kuantitatif untuk membantu manajer atau pengambil keputusan dalam membuat kebijakan (Nugroho dkk, 2012:1). *Explanatory research* dilakukan untuk menemukan penjelasan mengapa suatu kejadian atau gejala dapat terjadi (Prasetyo dan Jannah, 2005:43).

#### B. Lokasi Penelitian

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh melalui situs resmi Badan Pusat Statistik ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)) dan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Adapun data yang dibutuhkan adalah data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB, data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi NTB dan data penerimaan pajak Provinsi NTB tahun 2005-2015.

### C. Jenis Data dan Sumber Data

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah, sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif, yang menunjukkan fakta. Data juga merupakan kumpulan fakta, angka, atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik suatu kesimpulan (Siregar 2014:37). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan sumber sekunder dan premier.

Data sekunder adalah data/informasi yang telah tersedia dan hanya perlu diambil dan dianalisa sedangkan data premier adalah data/informasi yang diperlukan harus dikumpulkan sendiri (Widi, 2009; 235). Penelitian ini menggunakan data *time series*, menurut (Siregar 2014:38), data *time series* adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu pada satu objek, dengan tujuan untuk menggambarkan perkembangan dari objek tersebut.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan data primer dan sekunder dalam suatu penelitian (Siregar 2014:39). Teknik pengumpulan data berkaitan dengan cara peneliti mengumpulkan sumber data yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Dokumentasi
2. Studi Kepustakaan

Pada teknik pengumpulan data dokumentasi, data didapat dan dikumpulkan dengan cara mencari dan mengumpulkan data dari lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data mengenai IPM dan PDRB dari website Badan Pusat Statistik, serta data penerimaan pajak dari Dinas Pendapatan Provinsi NTB. Dalam rangka mendukung data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, peneliti juga melakukan studi kepustakaan dengan membaca buku-buku referensi, media cetak, media online, serta jurnal-jurnal ilmiah dan sebagainya. Informasi tersebut selanjutnya peneliti gunakan untuk mendukung data yang diperoleh dari hasil dokumentasi.

#### **E. Populasi dan Sampel**

Menurut Sarjono dan Julianita (2011:21) populasi dijelaskan sebagai karakteristik yang menjadi objek penelitian, dimana karakteristik tersebut berkaitan dengan seluruh kelompok orang, peristiwa, atau benda yang menjadi pusat perhatian bagi peneliti. Penelitian ini menggunakan populasi berupa data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), produk domestik regional bruto (PDRB) periode 2005 hingga 2015.

“Sampel adalah bagian dari populasi yang dipercaya dapat mewakili karakteristik populasi secara keseluruhan” (Sarjono dan Julianita, 2011: 21). Karena jumlah populasi sedikit, maka populasi dalam penelitian ini sekaligus dijadikan sebagai sampel. Sampel dalam penelitian ini yaitu data Indeks

Pembangunan Manusia dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRD) di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode tahun 2005-2015.

## F. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini, penelitian ini menggunakan dua kelompok variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat.

1. Variabel bebas (*Independent variable*) merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia ( $X_1$ ) dan Produk Domestik Regional Bruto ( $X_2$ ).
2. Variabel terikat (*dependent variable*) merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak ( $Y$ ).

Variabel-variabel yang digunakan oleh peneliti diatas memiliki definisi operasional sebagai berikut:

### 1. Variabel Bebas (*Independen variable*)

#### a. Indeks Pembangunan Manusia ( $X_1$ )

Indek Pembangunan Manusia merupakan indikator dalam menilai kinerja pembangunan manusia dalam suatu wilayah. Penelitian ini menggunakan data IPM yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik periode 2005 sampai 2015.

#### b. Produk Domestik Regional Bruto ( $X_2$ )

Produk Domestik Regional Bruto atau yang disebut PDRB merupakan gambaran produktivitas masyarakat yang berada di suatu wilayah dalam waktu

tertentu. PDRB juga menunjukkan perkembangan dan kemajuan ekonomi suatu daerah. Dalam penelitian ini, data PDRB diambil dari Badan Pusat Statistik keluaran 2005-2015.

**2. Variabel Terikat (Dependent variable)**

Penerimaan pajak (Y)

Penerimaan pajak merupakan jumlah penerimaan pajak yang diterima oleh negara dari semua jenis pajak yang ada di Indonesia. Data penerimaan pajak dalam penelitian ini didapat dari Dinas Pendapatan Provinsi NTB dengan periode yang sama yaitu dari tahun 2005 sampai tahun 2015.

**Tabel 7. Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Indikator	Item
Indeks Pembangunan Manusia (X1)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat Kesehatan.</li> <li>2. Tingkat Pendidikan.</li> <li>3. Standar hidup layak.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umur panjang dan hidup sehat yang dihitung berdasarkan Angka harapan hidup saat lahir.</li> <li>2. Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.</li> <li>3. Paritas daya beli yang dihitung berdasarkan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.</li> </ol>
Produk Domestik Regional Bruto (X2)	Total <i>output</i> akhir barang dan jasa yang dihasilkan dari perekonomian di Provinsi NTB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di Provinsi Nusa Tenggara Barat</li> <li>2. Jumlah semua komponen</li> </ol>



		<p>permintaan akhir dalam tahun berjalan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.</p> <p>3. Jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang turut serta dalam proses produksi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.</p>
Penerimaan Pajak Provinsi (Y)	Jumlah seluruh penerimaan yang berasal dari setoran pajak provinsi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan di Provinsi NTB	<p>1. Pajak Kendaraan Bermotor.</p> <p>2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,.</p> <p>3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,</p> <p>4. Pajak Air Permukaan,</p> <p>5. Pajak Rokok.</p>

Sumber: Data diolah Peneliti (2016)

## G. Teknik Analisis Data

### 1. Analisis Statistik Deskriptif

Peneitian ini menggunakan data yang ada dalam sampel. Data populasi tersebut umumnya masih mentah dan belum tertata dengan baik. Untuk itu perlu dilakukan uji statistik deskriptif dengan tujuan menyajikan data yang telah diperoleh secara lebih matang dan tertata dengan baik. Statistik deskriptif adalah statistik yang berkenaan dengan bagaimana cara mendeskripsikan,

menggambarkan, menjabarkan, atau menguraikan data agar mudah dipahami (Siregar, 2014:2).

Sugiyono (2009: 2007) menjelaskan bahwa hasil dari uji statistik deskriptif adalah menyajikan data yang diperoleh melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, *pictogram*, perhitungan modus, median, *mean* (pengukuran tendensi sentral), perhitungan desil, presentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi dan perhitungan presentase. Statistik deskriptif juga dapat dilakukan untuk mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi. Hanya perlu diketahui bahwa dalam analisis korelasi, regresi, atau membandingkan dua nilai rata-rata (populasi/sampel) atau lebih tidak perlu diuji signifikansinya. Jadi secara teknis dapat diketahui bahwa, dalam statistik deskriptif tidak ada uji signifikansi, tidak ada taraf kesalahan, karena peneliti tidak bermaksud membuat generalisasi, sehingga tidak ada kesalahan generalisasi.

## 2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik diperlukan dalam penelitian ini sebagai alat untuk mengetahui dan mengukur ada tidaknya pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Setelah diadakan perhitungan regresi berganda melalui alat bantu SPSS for Windows, diadakan pengujian uji asumsi klasik regresi. Ada berbagai macam uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### a. Uji Normalitas

Uji normalitas berfungsi untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak (Priyatno, 2014: 69). Normalitas data merupakan hal yang penting karena data yang terdistribusi normal, maka data tersebut dianggap dapat mewakili populasi. Uji normalitas dilakukan menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov*. Untuk pengambilan keputusan apakah data normal atau tidak dilihat berdasarkan nilai signifikansi (*Asymp Sig 2-tailed*). Jika signifikansi kurang dari 0,05, maka kesimpulannya data tidak berdistribusi normal. Jika signifikansi lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal.

### b. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varians variabel tidak sama untuk semua pengamatan atau observasi. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah terjadinya homoskedastisitas dalam model atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Sarjono dan Julianita, 2011:66).

Terdapat beberapa cara untuk melakukan pengujian heteroskedastisitas yaitu uji *scatterplot*, uji gletjer, uji *park*, dan uji *white*. Peneliti akan menggunakan uji *scatterplot* dalam mencari heteroskedastisitas variabelnya dengan menggunakan aplikasi SPSS. Tingkat heteroskedastisitas data diukur dari kejelasan pola dan penyebaran titik pada *grafik scatterplot*, dengan dasar analisis sebagai berikut:

- 1) Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titiknya menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139)

### c. Uji Multikolonieritas

Menurut Sarjono dan Juanita (2011: 70) uji multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan diantara variabel bebas memiliki masalah multikolonieritas (gejala multikolonieritas) atau tidak. Multikolonieritas didefinisikan sebagai hubungan korelasi (sebab akibat) yang saling mempengaruhi antar variabel bebas. Sehingga penelitian yang menggunakan variabel bebas lebih dari satu membutuhkan adanya uji multikolonieritas. Uji multikolonieritas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat VIF dengan bantuan aplikasi SPSS.

Menurut Ghozali (2011: 105), terdapat beberapa cara mendeteksi ada tidaknya multikolonieritas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Nilai  $R^2$  yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris yang sangat tinggi, tetapi secara individual variabel bebas banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat.
- 2) Menganalisis korelasi diantara variabel bebas. Jika diantara variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi (lebih besar daripada 0.90), hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas. Tidak adanya korelasi yang

tinggi antar variabel bebas tidak berarti bebas dari multikolonieritas. Multikolonieritas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel bebas.

- 3) Multikolonieritas dapat juga dilihat dari nilai (1) nilai *tolerance* dan lawannya (2) *variance inflation factor* (VIF), jika nilai  $VIF > 10$  atau nilai  $tolerance > 0,10$  maka terjadi multikolonieritas. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya.

#### d. Uji Autokorelasi

Sarjono dan Juanita (2011: 80) memaparkan bahwa uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu (*disturbance term -ed.*) pada periode  $t$  dan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ( $t-1$ ). Apabila terjadi korelasi maka hal tersebut menunjukkan problem korelasi.

Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain dengan uji *Durbin-Watson*, uji *Language Multiplier* (LM), uji Statistik Q, dan uji *Run Test*. Pada penelitian ini, peneliti akan menguji autokorelasi dengan melakukan uji *Durbin-Watson* dengan menggunakan aplikasi SPSS. Pengambilan keputusan atas uji autokorelasi didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

**Tabel 8. Hasil Keputusan Uji Autokorelasi**

Hipotesis 0	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_1$
Tidak ada autokorelasi positif	Tidak ada keputusan	$d_1 \leq d \leq d_u$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4 - d_1 < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tidak ada keputusan	$4 - d_u < d < 4 - d_1$

Tidak ada autokorelasi, baik positif maupun negative	Tidak ditolak	$du < d < 4-du$
--	---------------	-----------------

Sumber: Data diolah Peneliti (2016)

### 3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier adalah analisis untuk mengetahui pengaruh atau hubungan linier antara variabel independen terhadap variabel dependen, dan untuk memprediksi atau meramalkan suatu nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen (Priyatno, 2014: 134). Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen dan dua variabel independen, maka digunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan :

Y= Variabel terikat

a = Konstanta

$b_1, b_2$  = Koefisien regresi  $X_1, \dots$

### 4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan peneliti dengan tujuan mencari kebenaran atas hipotesis yang telah dibuat. Uji hipotesis dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

#### a. Uji F

Uji F atau uji secara simultan dilakukan untuk menguji apakah variabel-variabel bebas (IPM dan PDRB) secara bersama-sama mempunyai

pengaruh terhadap variabel terikat. Menurut Ghozali (2011:98) kriteria pengambilan keputusan uji F yang digunakan untuk menguji hipotesis dengan statistik F adalah sebagai berikut:

- a) Jika nilai F lebih besar daripada 0,05 atau 5% maka  $H_0$  dapat ditolak. Dengan kata lain  $H_a$  diterima, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan tidak mempengaruhi variabel dependen.
- b) Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Jika nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

b. Uji t

Uji t atau yang disebut uji parsial, dilakukan untuk menguji apakah variabel-variabel bebas (IPM dan PDRB) secara terpisah mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Ghozali (2011: 99) menjelaskan kriteria pengambilan keputusan yang digunakan untuk menguji hipotesis dengan statistik t adalah sebagai berikut:

- a) Jika nilai koefisien *degree of freedom* (df) adalah sebesar 0,05 atau sebesar 5%, maka  $H_0$  dapat ditolak. Dengan kata lain,  $H_a$  diterima bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.
- b) Membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Jika nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen (Ghozali, 2011: 97). Lebih lanjut, Ghozali menjelaskan kriteria penilaian  $R^2$  adalah sebagai berikut :

- 1) Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.
- 2) Nilai  $R^2$  yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen variabel.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

Provinsi NTB terdiri atas 2 (dua) pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa beserta ratusan pulau-pulau kecil. Dari 280 pulau yang terdaftar, tercatat hanya 32 pulau yang sudah berpenghuni. Luas wilayah Provinsi NTB mencapai 20.153,20 km<sup>2</sup>. Terletak antara 115° 46' – 119° 5' Bujur Timur dan 8° 10' – 9° 5' Lintang Selatan.

#### Lambang Provinsi NTB



**Gambar 3. Logo Provinsi NTB**

Sumber: *Google (2017)*

Provinsi NTB terdiri dari 5 kabupaten/kota di Pulau Lombok yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara dan Kota Mataram dan 5 kabupaten/kota di Pulau Sumbawa yang terdiri dari Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa

barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima. Pusat pemerintahan Provinsi NTB terletak di Kota Mataram.

#### Provinsi Nusa Tenggara Barat



**Gambar 4. Peta Provinsi NTB**

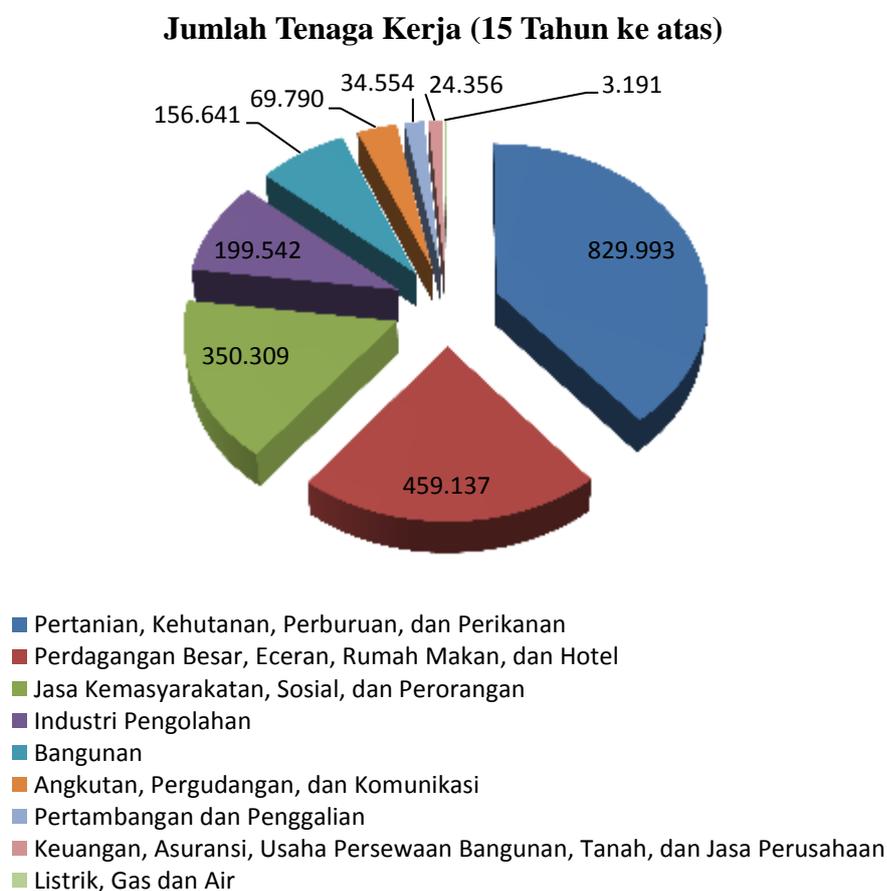
*Sumber: Google (2017)*

Luas Pulau Sumbawa mencapai 15.414,5 km<sup>2</sup> (76,49%) atau 2/3 dari luas Provinsi NTB, sedangkan luas Pulau Lombok hanya 1/3 saja. Provinsi NTB berbatasan langsung dengan Laut Flores di sebelah utara dan Samudera Hindia di sebelah selatan. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Lombok dan Pulau Bali sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan Selat Sape dan Provinsi NTT.

Berdasarkan data proyeksi penduduk tahun 2010-2035 jumlah penduduk Provinsi NTB mencapai 4.835.600 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun dari tahun 2000-2010 mencapai 1,17%, sedangkan antara tahun 2010-2015 meningkat menjadi 1,38% (Statistik Indonesia 2016: 82). Tahun 2015 tercatat kepadatan penduduk provinsi NTB sebesar 260 jiwa per km<sup>2</sup>, naik dari 234 jiwa per km<sup>2</sup> ditahun 2010. Berdasarkan jumlah penduduk tersebut, jumlah angkatan kerja di Provinsi NTB tahun 2015 tercatat sejumlah

2.307.737 jiwa dengan jumlah yang angkatan kerja yang bekerja sejumlah 2.127.513 jiwa atau sebesar 94,31% dari total angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja tersebut tersebar pada berbagai lapangan pekerjaan umum yang tersedia di Provinsi NTB dengan uraian sebagai berikut:

**Gambar 5. Jumlah Angkatan Kerja pada Berbagai Lapangan Pekerjaan Umum Provinsi NTB Tahun 2015**



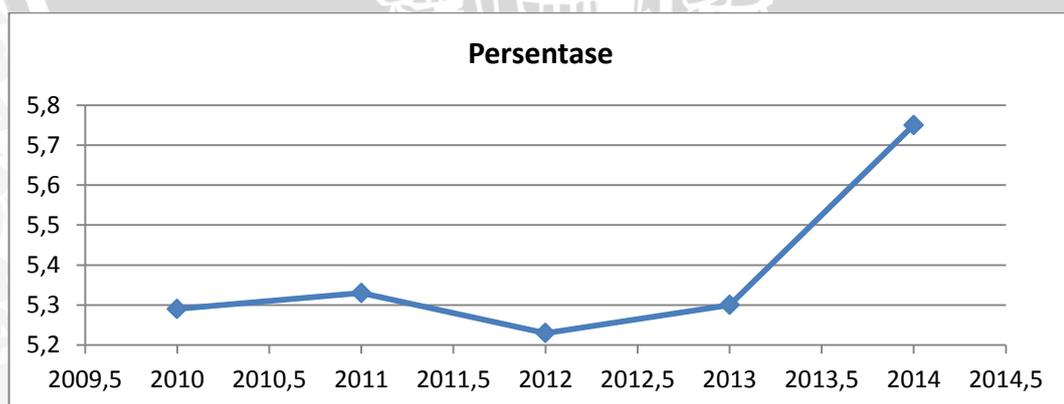
*Sumber: Statistik Indonesia, Data diolah Peneliti (2017)*

Berdasarkan gambar 5 terlihat bahwa jumlah angkatan kerja provinsi NTB paling banyak bekerja pada sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan. Hanya sedikit yang bekerja pada bidang listrik, gas dan air. Disisi

lain, angkatan kerja provinsi NTB yang bekerja di sektor pertambangan dan penggalian hanya menduduki peringkat ke-7 dari sembilan jenis lapangan pekerjaan umum, dimana provinsi NTB merupakan salah satu provinsi yang terdapat tambang di dalamnya.

Sama halnya dengan sektor pertambangan, sektor industri di Provinsi NTB belum memberikan *sharing* yang cukup dalam perekonomian NTB, karena perannya hanya sekitar 5% saja. Kecilnya *sharing* sektor industri karena mayoritas industri yang ada di NTB adalah industri kecil dan kerajinan rumah tangga. Disisi lain, tidak semua angkatan kerja di NTB memiliki atau mempunyai pekerjaan. Hal menyebabkan masih terdapat banyak pengangguran yang ada di daerah yang menyebabkan perhatian pemerintah terpecah antara meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengangguran. Tingkat pengangguran di NTB dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

**Gambar 6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2010-2014**



Sumber: Statistik Indonesia 2016 dan 2015, data diolah Peneliti (2017)

Berdasarkan gambar diatas diketahui walaupun NTB mengalami pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun, namun hal itu tidak sejalan

dengan penekanan tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka di NTB menurut gambar 6 menunjukkan bahwa dalam kurun 5 tahun terakhir tingkat pengangguran terbuka di NTB memang berfluktuasi namun dalam siklus yang meningkat. Bahkan pada tahun 2014 persentase penduduk pengangguran terbuka di NTB meningkat tajam. Salah satu penyebab meningkatnya pengangguran yaitu kurangnya lapangan kerja yang tersedia bagi angkatan kerja di daerah. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya antisipasi pemerintah atas meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Namun meningkatnya pengangguran tidak berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk miskin di NTB. Berdasarkan data statistik memperlihatkan bahwa jumlah penduduk miskin berada dalam kecenderungan yang menurun.

**Tabel 9. Jumlah Penduduk Miskin di NTB 2010-2014**

Tahun	Jumlah	Presentase
2014	820.820	17,24
2013	843.664	17,97
2012	852.516	18,63
2011	900.573	19,73
2010	1.009.352	21,55

Sumber: NTB Dalam Angka 2015, Data diolah Peneliti (2017)

Melihat data dari tabel 9 di atas, mengindikasikan bahwa walaupun pengangguran ada kecenderungan meningkat, namun kemiskinan tetap menurun dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh semakin mantapnya perekonomian daerah yang juga disumbangkan oleh semakin mantapnya perekonomian para angkatan kerja yang memiliki pekerjaan. Dengan berkurangnya kemiskinan di NTB, maka akan berdampak pula pada tingkat

investasi dalam hal pendidikan masyarakatnya. salah satunya terhadap tingkat buta huruf di NTB yang terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 10. Persentase Buta Huruf di NTB 2010-2014**

Tahun	Jumlah Penduduk	Persentase
2014	4.773.795	10,37
2013	4.630.302	12,81
2012	4.646.793	16,32
2011	4.581.818	16,51
2010	4.516.062	17,60

Sumber: NTB Dalam angka 2015. Data diolah Peneliti (2017)

Berdasarkan tabel 10 tentang persentase buta huruf di NTB, terlihat bahwa dari tahun 2010 hingga tahun 2014 jumlah penduduk mengalami peningkatan. Sedangkan persentase buta huruf dari tahun 2010 hingga 2014 mengalami penurunan. Hal ini menjelaskan bahwa adanya peningkatan kualitas SDM di NTB. Salah satunya dikarenakan kemantapan ekonomi masyarakat yang ditandai dengan menurunnya kemiskinan dari tahun ke tahun sehingga pemberdayaan masyarakat meningkat pula. Hal ini yang terlihat pada data di atas bahwa persentase buta huruf di NTB selalu menurun dari tahun ke tahun.

## **B. Gambaran Umum Sumber Data**

### **1. Badan Pusat Statistik**

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang bertanggung jawab langsung ke pada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU No 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Biro Pusat Statistik kemudian berubah menjadi Badan berdasarkan UU No 16

Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU tersebut BPS memiliki peranan yang harus dijalankan, antara lain:

- a. Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus dan survei yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintah lainnya sebagai data sekunder.
- b. Membantu kegiatan statistik di departemen, lembaga pemerintah atau institusi lainnya dalam membangun sistem perstatistikan nasional.
- c. Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan layanan dalam bidang pendidikan dan pelatihan fisik.
- d. Membangun kerjasama dengan istitusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia.

Dalam menjalankan tugasnya, BPS memiliki visi dan misi serta nilai-nilai inti lembaga, yaitu :

- a. Visi Badan Pusat Statistik  
Pelopor data statistik terpercaya untuk semua.
- b. Misi Badan Pusat Statistik
  - 1) Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional.
  - 2) Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik.
  - 3) Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

c. Nilai-nilai inti Badan Pusat Statistik

Nilai-nilai inti (*Core Values*) BPS merupakan pondasi yang kokoh untuk membangun jati diri dan penuntun perilaku setiap insan BPS dalam menjalankan tugas. Nilai-nilai inti BPS terdiri dari :

- 1) Profesional: kompeten, efektif, efisien, inovatif dan sistematis.
- 2) Integritas: dedikasi, disiplin, konsisten, terbuka dan akuntabel.
- 3) Amanah: terpercaya, jujur, tulus dan adil.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, susunan organisasi BPS terdiri dari :

- 1) Kepala;
- 2) Sekretariat Utama;
- 3) Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik;
- 4) Deputi Bidang Statistik Sosial;
- 5) Deputi Bidang Statistik Produksi;
- 6) Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa;
- 7) Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik;
- 8) Inspektorat Utama;
- 9) Pusat Pendidikan dan Latihan; dan
- 10) Instansi Vertikal.

BPS memiliki tugas, fungsi dan kewenangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, adapun tugas, fungsi dan wewenang BPS adalah sebagai berikut:

a. Tugas BPS

Melaksanakan tugas pemerintah di bidang statistik sesuai dengan perundang-undangan.

b. Fungsi BPS

- 1) Pengkajian, penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang statistik.
- 2) Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional.
- 3) Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar.
- 4) Penetapan sistem statistik nasional.
- 5) Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik.
- 6) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.

c. Wewenang BPS

- 1) Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya.
- 2) Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
- 3) Penetapan sistem informasi di bidangnya.
- 4) Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional.

- 5) Kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kegiatan statistik dan penyusunan pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral.

## **2. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di bawah naungan pemerintah Provinsi NTB. Dispenda Provinsi NTB dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah. Berdasarkan Perda tersebut maka kedudukan dispenda Provinsi NTB adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berada dibawah dan bertanggung jawan kepada Gubernur melalui Sekertaris Daerah.

Tugas Pokok Dispenda Provinsi NTB adalah membantu Gubernur dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang pendapatan daerah serta tugas dekonsentrasi. Capaian kinerja sarasannya yang ingin dicapai adalah meningkatkan pertumbuhan penerimaan daerah serta meningkatkan intensitas pengendalian terhadap realisasi penerimaan daerah.

Dalam pelaksanaan kegiatan keorganisasian, susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB dibentuk sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, terdiri dari:

- a) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- b) Sub Bagian Keuangan;
- c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3) Bidang Pajak dan Dana Perimbangan, terdiri dari;
  - a) Seksi Bagi Hasil Pajak
  - b) Seksi Dana Alokasi Umum dan Khusus
  - c) Seksi Royalti dan Pinjaman Daerah yang Sah
- 4) Bidang Pajak, terdiri dari;
  - a) Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - b) Seksi Pajak Lainnya
  - c) Seksi Keberatan Pajak dan Keluhan Masyarakat
- 5) Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya, terdiri dari;
  - a) Seksi Retribusi
  - b) Seksi Pendapatan Lainnya
  - c) Seksi Pembukuan dan Keberatan Retribusi/Pendapatan Lainnya
- 6) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

- a. Visi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB  
Menjadi koordinator pendapatan dan penghimpun pajak daerah yang proporsional, berkesinambungan dan akuntabel

b. Misi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB

- 1) Mewujudkan kemampuan sumber pendanaan daerah yang proporsional; dan berkesinambungan
- 2) Mewujudkan tata kelola keuangan dan barang milik daerah yang akuntabel

Adapun fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan
- b. Perencanaan program dan kegiatan bidang pendapatan
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendapatan
- d. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang pendapatan
- e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pendapatan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

**C. Statistik Deskriptif Data Penelitian**

**1. Indeks Pembangunan Manusia (  $X_1$  )**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator dalam melihat sejauh mana kinerja dan keseriusan pemerintah dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah/wilayahnya. IPM diukur berdasarkan tiga dimensi pokok yaitu tingkat pendidikan yang diukur berdasarkan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, tingkat kesehatan yang dihitung berdasarkan angka harapan hidup saat lahir serta kehidupan yang layak yang diukur berdasar paritas daya beli masyarakat setempat.

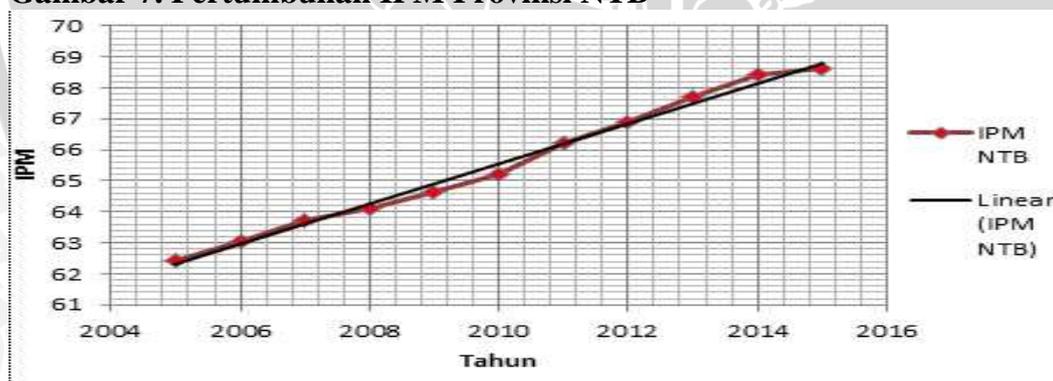
**Tabel 11. Rekapitulasi Hasil Deskriptif Data IPM**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
IPM	11	62.42	68.22	65.4327	2.00973
PDRB	11	25682670000.00	92791555100.00	51805399657.2728	21044134339.82914
Penerimaan Pajak	11	146981076058	1010655242476.00	486547428506.049	286036196317.661
Valid N (listwise)	11				

Sumber: Data diolah Peneliti (2016)

Pada penelitian ini, variabel bebas pertama yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia. Data IPM yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data IPM Provinsi NTB dalam kurun waktu 2005-2015. Nilai tertinggi dalam data ini adalah 68,22 yaitu IPM tahun 2015 dan data terendah adalah 62,42 yaitu IPM tahun 2005 dengan rata-rata nilai IPM Provinsi NTB sebesar 65,4327. Perkembangan IPM Provinsi NTB dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

**Gambar 7. Pertumbuhan IPM Provinsi NTB**



Sumber: Diolah oleh Peneliti (2016)

Berdasarkan gambar 7 terlihat IPM dari tahun ke tahun tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan. Hal itu terlihat dalam gambar bahwa peningkatan IPM NTB tidak selalu sejalan dengan linier IPM. Tahun 2008-2010 IPM NTB berada di bawah garis linier IPM.

## 2. Produk Domestik Regional Bruto ( $X_2$ )

Variabel bebas kedua yang digunakan peneliti adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB mencerminkan tingkat produktifitas suatu daerah yang diukur berdasarkan jumlah output akhir yang dihasilkan suatu daerah baik barang maupun jasa tanpa melihat siapa yang memproduksi, Statistik deskriptif PDRB dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini.

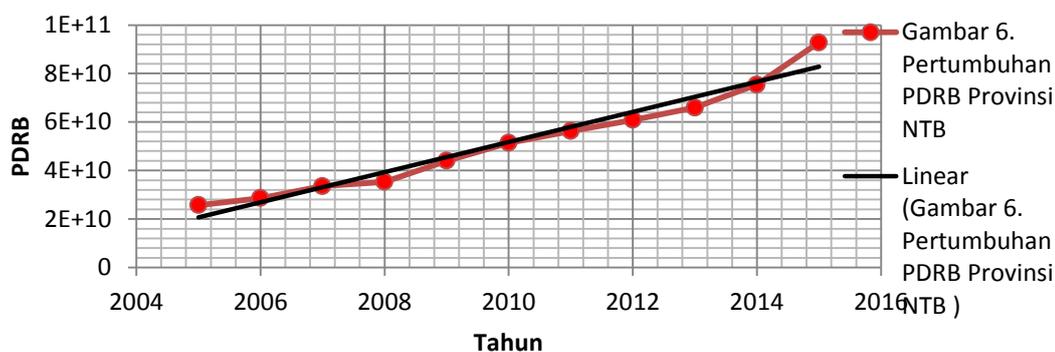
**Tabel 12. Rekapitulasi Hasil Deskriptif Data PDRB**

Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean
PDRB	11	25682670000	92791555100	5,18E+10
Valid N (listwise)	11			

Sumber: Data diolah Peneliti (2016)

Data PDRB dalam penelitian ini dikumpulkan dari tahun 2005 sampai tahun 2015. Data tertinggi dalam data PDRB sebesar 92.791.555.100 yang merupakan jumlah PDRB tahun 2015 sedangkan data terendah dalam data ini sebesar 25.682.670.000 yang merupakan jumlah PDRB tahun 2005 dengan rata-rata data sebesar 5,18 Milyar. Gambaran pertumbuhan PDRB data dapat dilihat dalam gambar dibawah ini.

**Gambar 8. Pertumbuhan PDRB Provinsi NTB**



Sumber: Diolah oleh Peneliti (2016)

Sama halnya dengan IPM, pertumbuhan PDRB NTB juga tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat pada gambar, bahwa kenaikan PDRB selama kurun waktu 11 tahun tidak sejalan dengan garis linier pertumbuhan PDRB. Sejak tahun 2008-2014, pertumbuhan PDRB NTB cenderung berada di bawah garis linier. Baru pada tahun 2015 pertumbuhan PDRB NTB meningkat tajam.

### 3. Penerimaan Pajak (Y)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel terikat berupa penerimaan pajak yang diperoleh di Dispenda Provinsi NTB mulai tahun 2005 sampai tahun 2015 dengan statistik deskriptif sebagai berikut.

**Tabel 13. Rekapitulasi Hasil Deskriptif Data Penerimaan Pajak (Ribu)**

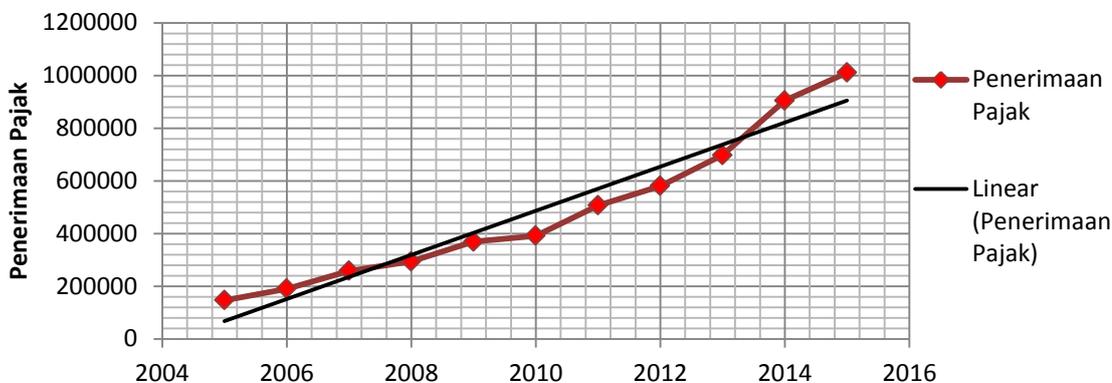
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean
Penerimaan Pajak	11	146981076	1010655242	486547428,4
Valid N (listwise)	11			

*Sumber: Data diolah Peneliti (2016)*

Data tertinggi dalam data penerimaan pajak sebesar Rp. 1.010.655.243 ribu yang merupakan penerimaan pajak provinsi NTB tahun 2015 dan data terendah sebesar Rp. 146.981.076 ribu yang merupakan penerimaan pajak tahun 2005. Rata-rata penerimaan pajak selama kurun waktu 2005 sampai 2015 sebesar Rp 486.547.428,4 ribu. Penerimaan pajak provinsi sangat dipengaruhi oleh jenis-jenis pajak yang menyusun penerimaan pajak provinsi secara keseluruhan, adapun perkembangan penerimaan pajak dari tahun ke tahun dapat dilihat dalam gambar di berikut ini.

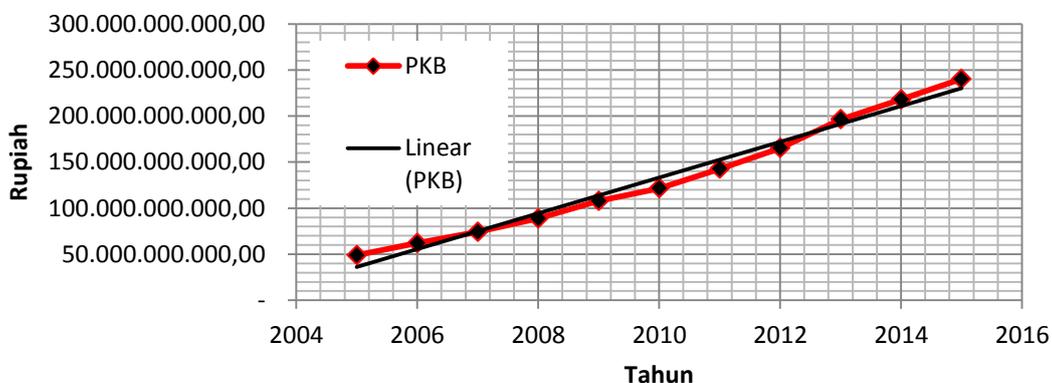
**Gambar 9. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Provinsi NTB (ribu rupiah)**



Sumber: Diolah oleh Peneliti

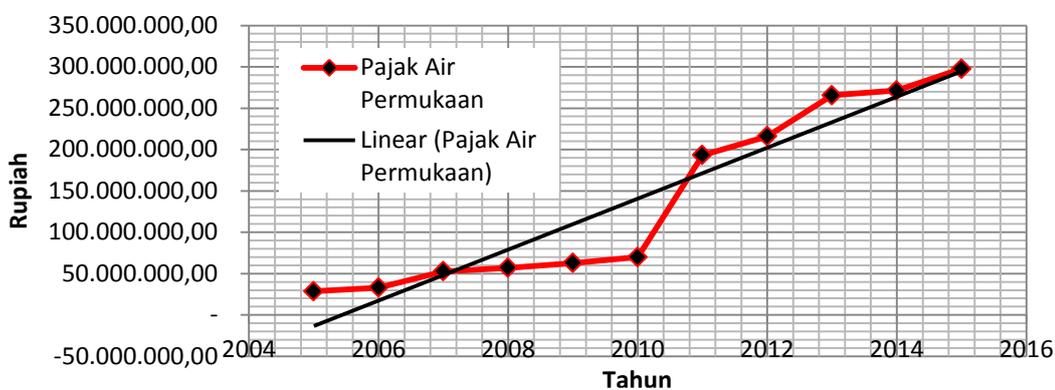
Berdasarkan gambar 9 di atas, dari tahun ke tahun penerimaan pajak di NTB selalu meningkat, namun tidak dalam peningkatan yang signifikan. Pertumbuhan penerimaan pajak di tahun 2008-2013 cenderung di bawah linier penerimaan pajak yang seharusnya. Peningkatan penerimaan pajak di atas tidak terlepas dari peningkatan masing-masing jenis pajak yang menjadi komponen penyusun penerimaan pajak provinsi. Pada gambar di bawah ini digambarkan grafik pendapatan berdasarkan jenis pajak penyusun penerimaan pajak provinsi NTB.

**Gambar 10. Pajak Kendaraan Bermotor**



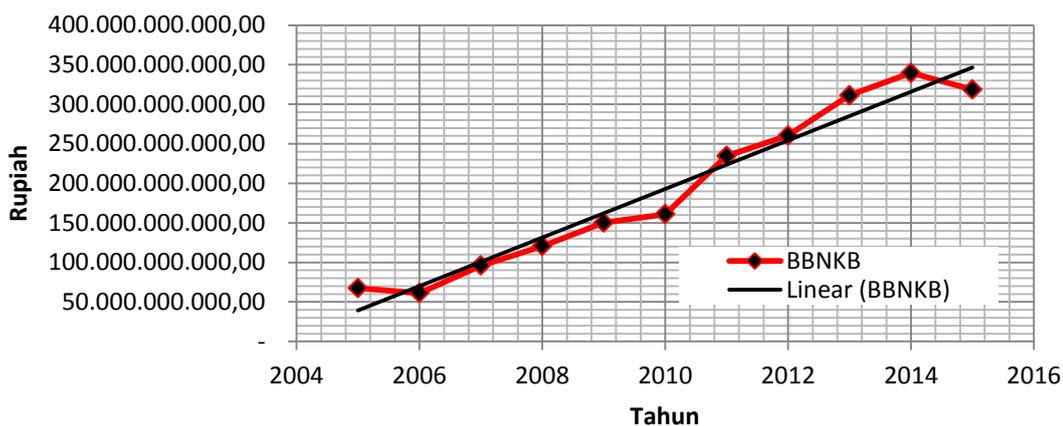
Sumber: Diolah oleh Peneliti (2016)

**Gambar 11. Pajak Air Permukaan**



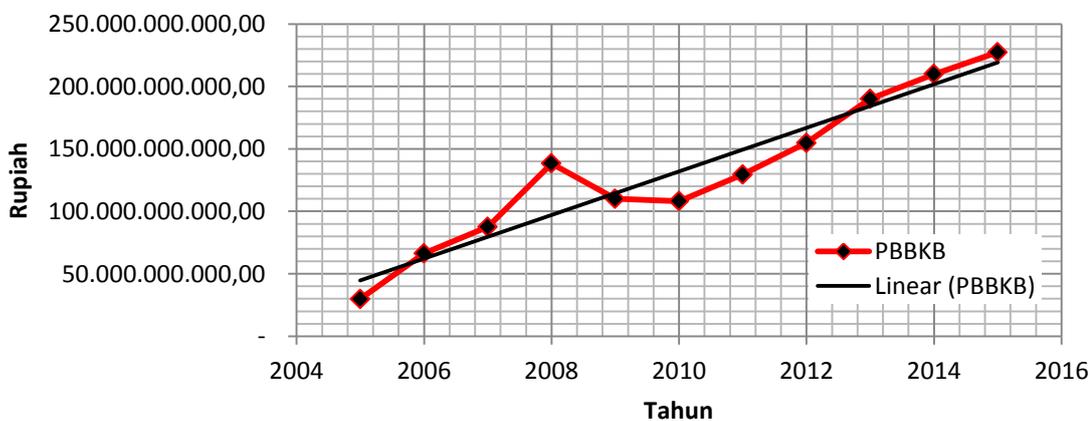
Sumber: Diolah oleh Peneliti (2016)

**Gambar 12. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**



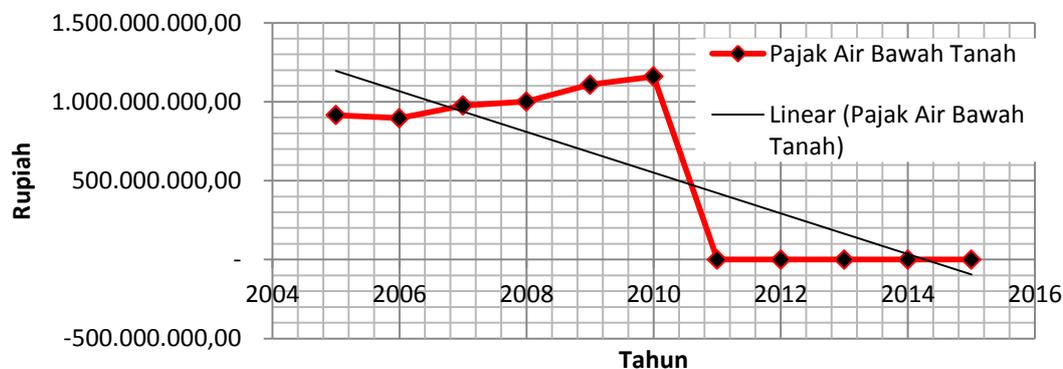
Sumber: Diolah oleh Peneliti (2016)

**Gambar 13. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor**



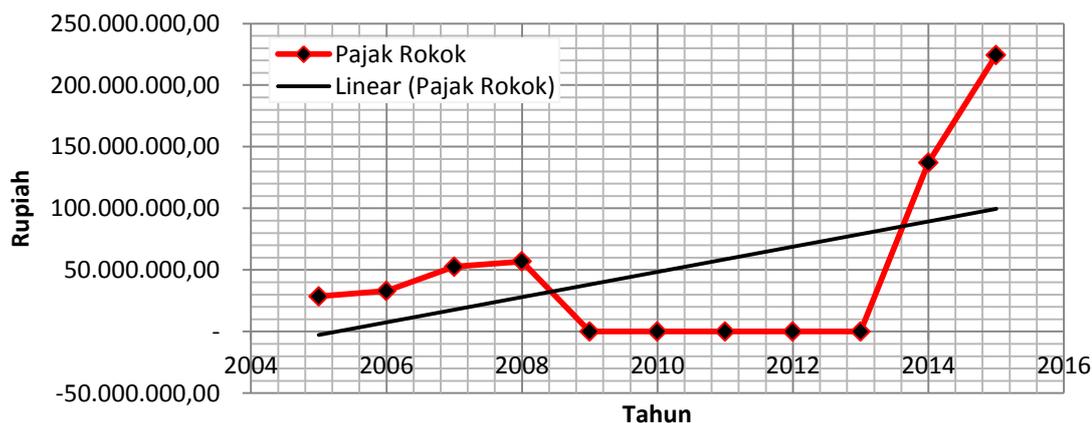
Sumber: Diolah oleh Peneliti (2016)

**Gambar 14. Pajak Air Bawah Tanah**



Sumber: Diolah oleh Peneliti (2016)

**Gambar 15. Pajak Rokok**



Sumber: Diolah oleh Peneliti (2016)

Berdasarkan gambar 10-157-12 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak yang termasuk jenis pajak daerah provinsi dari tahun ke tahun secara garis besar mengalami peningkatan. Beberapa jenis pajak mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun tertentu seperti Pajak Air Permukaan yang mengalami lonjakan penerimaan di tahun 2011. Begitu pula dengan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di tahun 2011 dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) pada tahun 2010.

Selain peningkatan, beberapa jenis pajak juga mengalami penurunan. Tahun 2015 BBNKB mengalami penurunan penerimaan dari tahun sebelumnya sedangkan penurunan Pajak Air Bawah Tanah dan Pajak Rokok masing-masing di tahun 2011 dan 2009 mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan tidak ada target penerimaan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

#### D. Analisis Data Hasil Penelitian

##### 1. Uji Asumsi Klasik

###### a. Uji Normalitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual tersebar normal atau tidak. Prosedur uji normalitas yang dilakukan adalah dengan uji *Kolmogorov-Smirnov*, dengan ketentuan sebagai berikut menentukan Hipotesis yang digunakan sebagai berikut:

- $H_0$  : residual tersebar normal
- $H_1$  : residual tidak tersebar normal

Jika nilai **sig.** (*p-value*) > 0,05 maka  $H_0$  diterima yang artinya normalitas terpenuhi.

**Tabel 14. Hasil Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		11
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000777
	Std. Deviation	1.3594E+011
Most Extreme Differences	Absolute	.260
	Positive	.133
	Negative	-.260
Kolmogorov-Smirnov Z		.862
Asymp. Sig. (2-tailed)		.448

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

Sumber: Data diolah Peneliti (2016)

Dari hasil perhitungan didapat nilai **sig.** sebesar 0.448 dapat dilihat pada Tabel 16 atau lebih besar dari 0.05, maka ketentuan  $H_0$  diterima yaitu bahwa asumsi normalitas terpenuhi.

#### b. Uji Heterokedastisitas

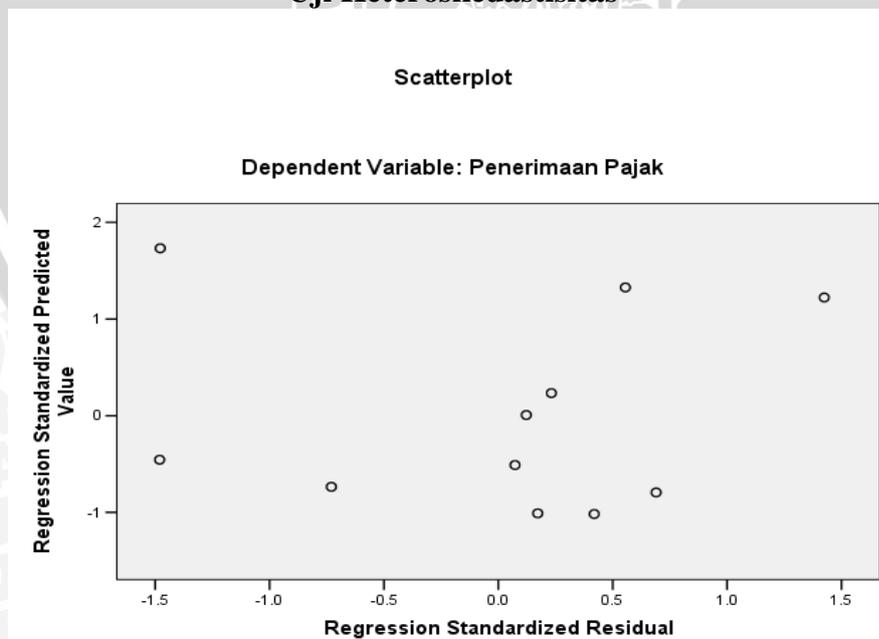
Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan nilai simpangan residual akibat besar kecilnya nilai salah satu variabel bebas. Atau adanya perbedaan nilai ragam dengan semakin meningkatnya nilai variabel bebas. Prosedur uji dilakukan dengan Uji *Scatter Plot*. Pengujian kehomogenan ragam sisaan dilandasi pada hipotesis:

$H_0$  : ragam sisaan homogen

$H_1$  : ragam sisaan tidak homogen

Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar berikut.

#### Uji Heteroskedastisitas



Gambar 16. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah Peneliti (2016)

Dari hasil pengujian tersebut didapat bahwa diagram tampilan *scatterplot* menyebar dan tidak membentuk pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa sisaan mempunyai ragam homogen (konstan) atau dengan kata lain tidak terdapat gejala heterokedastisitas. Dengan terpenuhi seluruh asumsi klasik regresi di atas maka dapat dikatakan model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sudah layak atau tepat sehingga dapat diambil interpretasi dari hasil analisis regresi berganda yang telah dilakukan.

### c. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui bahwa tidak terjadi hubungan yang sangat kuat atau tidak terjadi hubungan linier yang sempurna atau dapat pula dikatakan bahwa antar variabel bebas tidak saling berkaitan. Cara pengujiannya adalah dengan membandingkan nilai *tolerance* yang didapat dari perhitungan regresi berganda, apabila nilai *tolerance*  $< 0,1$  maka terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 15. Hasil Uji Multikolinearitas**

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	IPM	.789	1.267
	PDRB	.789	1.267

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Data diolah Peneliti (2016)

Berdasarkan Tabel 15 didapat hasil pengujian dari masing-masing variabel bebas sebagai berikut:

- Tolerance untuk IPM adalah 0.789
- Tolerance untuk PDRB adalah 0.789

Pada hasil pengujian didapat bahwa keseluruhan nilai *tolerance*  $> 0,1$  sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas.

Uji multikolinearitas dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan nilai VIF (*Variance Inflation Faktor*) dengan angka 10. Jika nilai VIF  $> 10$  maka terjadi multikolinearitas. Berikut hasil pengujian masing-masing variabel bebas :

- VIF untuk IPM adalah 1,267
- VIF untuk PDRB adalah 1,267

Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas. Dengan demikian uji asumsi tidak adanya multikolinearitas dapat terpenuhi.

#### d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui korelasi antara sisaan yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam deret waktu) atau ruang (seperti dalam data *cross section*). Dalam konteks regresi, model regresi linier klasik mengasumsikan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam sisaan ( $\epsilon_i$ ). Hal ini memperlihatkan bahwa model klasik mengasumsikan bahwa unsur sisaan yang berhubungan dengan pengamatan tidak dipengaruhi oleh sisaan yang berhubungan dengan pengamatan lain manapun.

Uji ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW-test).

Hipotesis yang melandasi pengujian adalah:

$$H_0 : \rho = 0 \text{ (tidak terdapat autokorelasi di antara sisaan)}$$

$$H_1 : \rho \neq 0 \text{ (terdapat autokorelasi di antara sisaan)}$$

Statistik Durbin-Watson yang dirumuskan oleh statistik  $d$ , yaitu:

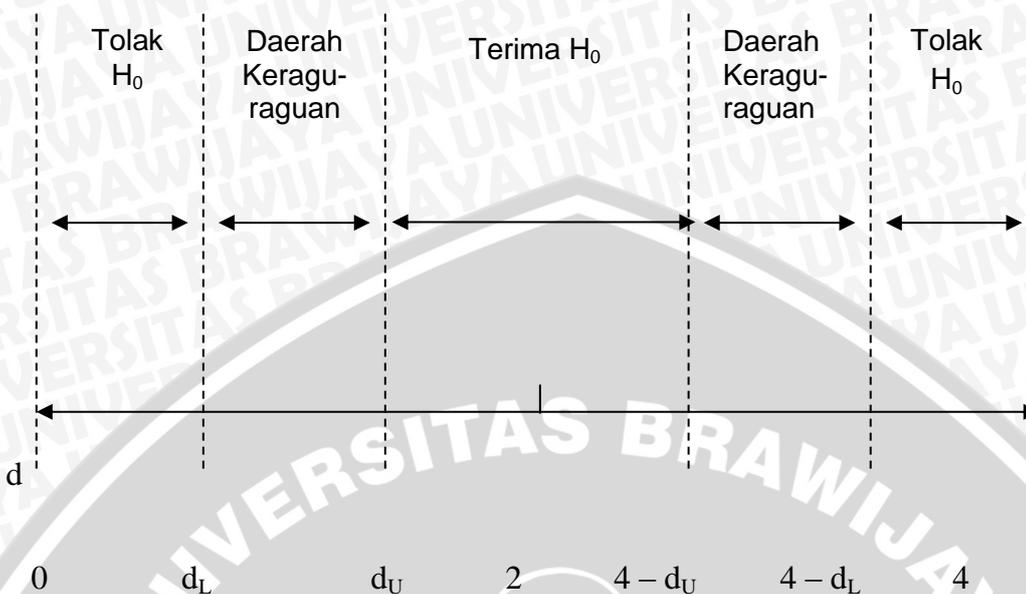
$$d = \frac{\sum (e_t - e_{t-1})^2}{\sum e^2}$$

Banyak pengamatan pada pembilang statistik  $d$  adalah  $n - 1$  karena satu pengamatan hilang dalam mendapatkan perbedaan yang berurutan.

Prosedur uji Durbin-Watson adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan banyaknya pengamatan dan peubah penjelas tentukan nilai-nilai kritis  $d_L$  dan  $d_U$ .
- 2) Terapkan kaidah keputusan:
  - a. Jika  $d < d_L$  atau  $d > (4 - d_L)$ , maka  $H_0$  ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi terhadap sisaan.
  - b. Jika  $d_U < d < (4 - d_U)$ , maka  $H_0$  diterima, berarti tidak terdapat autokorelasi antar sisaan.
  - c. Namun jika  $d_L < d < d_U$  atau  $(4 - d_U) < d < (4 - d_L)$ , maka uji Durbin-Watson tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti (inconclusive).

Untuk nilai-nilai ini, tidak dapat (pada suatu tingkat signifikansi tertentu) disimpulkan ada tidaknya autokorelasi di antara faktor-faktor gangguan.



**Gambar 17. Kaidah Keputusan Uji Autokorelasi**

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2016)

Keterangan:

$d_U$  = Durbin-Watson Upper (batas atas dari tabel Durbin-Watson)

$d_L$  = Durbin-Watson Lower (batas bawah dari tabel Durbin-Watson)

Dari tabel Durbin-Watson untuk  $n = 11$  dan  $k = 2$  (adalah banyaknya variabel bebas) diketahui nilai  $d_U$  sebesar 1.604 dan  $4 - d_U$  sebesar 2.396. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 16. Hasil Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>a</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.880 <sup>a</sup>	.774	.718	1.520E+011	1.777

a. Predictors: (Constant), PDRB, IPM

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Data diolah Peneliti (2016)

Dari Tabel 16 diketahui nilai uji Durbin Watson sebesar 1,777 yang terletak antara 1.604 dan 2.396, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi tidak terdapat autokorelasi telah terpenuhi.

## 2. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antara variabel bebas, yaitu IPM ( $X_1$ ), PDRB ( $X_2$ ), terhadap variabel terikat yaitu Penerimaan Pajak ( $Y$ ).

### a. Persamaan Regresi

Persamaan regresi digunakan mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan menggunakan bantuan *SPSS for Windows ver 20.00* didapat model regresi seperti pada tabel berikut.

**Tabel 17. Persamaan Regresi**

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-4851185328019.62	1705003304145.563		-2.845	.022
	IPM	76260285387.5262	26919754386.04389	.536	2.833	.022
	PDRB	6.714	2.571	.494	2.612	.031

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Data diolah Peneliti (2016)

Berdasarkan pada Tabel 17 didapatkan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = -4851185328019,620 + 76260285387,526 X_1 + 6,714 X_2$$

Dari persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan Pajak akan meningkat sebesar 76260285387,526 satuan untuk setiap tambahan satu satuan  $X_1$  (IPM). Jadi apabila IPM mengalami

peningkatan 1 satuan, maka Penerimaan Pajak akan meningkat sebesar 76260285387,526 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.

- 2) Penerimaan Pajak akan meningkat sebesar 6,714satuan untuk setiap tambahan satu satuan  $X_2$  (PDRB), Jadi apabila PDRB mengalami peningkatan 1 satuan, maka Penerimaan Pajak akan meningkat sebesar 6,714 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.

**b. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Untuk mengetahui besar kontribusi variabel bebas ( $IPM(X_1)$ ,  $PDRB(X_2)$ ) terhadap variabel terikat (Penerimaan Pajak) digunakan nilai  $R^2$ , nilai  $R^2$  dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 18. Koefisien Korelasi dan Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.880 <sup>a</sup>	.774	.718	1.520E+011	1.777

a. Predictors: (Constant), PDRB, IPM  
 b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Data diolah Peneliti (2016)

Koefisien determinasi digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh atau kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari analisis pada Tabel 15 diperoleh hasil *adjusted R<sup>2</sup>* (koefisien determinasi) sebesar 0,718. Artinya bahwa 71,8% variabel Penerimaan Pajak akan dipengaruhi oleh variabel bebasnya, yaitu  $IPM(X_1)$ ,  $PDRB(X_2)$ ). Sedangkan sisanya 28,2%

variabel Penerimaan Pajak akan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Selain koefisien determinasi juga didapat koefisien korelasi yang menunjukkan besarnya hubungan antara variabel IPM dan PDRB terhadap variabel Penerimaan Pajak, nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0,777, nilai korelasi ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas yaitu IPM( $X_1$ ), PDRB ( $X_2$ ) dengan Penerimaan Pajak termasuk dalam kategori sangat kuat karena berada pada selang 0,75 – 1,0.

### 3. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan bagian penting dalam penelitian setelah data terkumpul dan diolah, kegunaan utamanya adalah untuk menjawab hipotesis.

#### a) Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah hasil dari analisis regresi signifikan atau tidak. Jika hasilnya signifikan, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sedangkan jika hasilnya tidak signifikan, maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Hal ini dapat juga dikatakan sebagai berikut :

$H_0$  ditolak jika F hitung > F tabel

$H_0$  diterima jika F hitung < F tabel

**Tabel 19. Hasil Uji F/Simultan**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6.333828E+023	2	3.167E+023	13.711	.003 <sup>a</sup>
	Residual	1.847842E+023	8	2.310E+022		
	Total	8.181671E+023	10			

a. Predictors: (Constant), PDRB, IPM

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Data diolah Peneliti (2016)

Berdasarkan Tabel 19 didapat nilai F hitung sebesar 13,711 sedangkan F tabel ( $\alpha = 0.05$  ; db regresi = 2 : db residual = 8) adalah sebesar 4,459. Karena F hitung > F tabel yaitu  $13,711 > 4,459$  atau nilai Sig. F (0,000) <  $\alpha = 0.05$  maka model analisis regresi adalah signifikan. Hal ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel terikat (Penerimaan Pajak) dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel bebas (IPM ( $X_1$ ), PDRB ( $X_2$ ))

#### b) Uji t/Parsial

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Dapat juga dikatakan jika t hitung > t tabel atau -t hitung < -t tabel maka hasilnya signifikan dan berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sedangkan jika t hitung < t tabel atau -t hitung > -t tabel maka hasilnya tidak signifikan dan berarti  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 20. Hasil Uji t/Parsial**

		Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-4851185328019.62	1705003304145.563		-2.845	.022
	IPM	76260285387.5262	26919754386.04389	.536	2.833	.022
	PDRB	6.714	2.571	.494	2.612	.031

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Data diolah Peneliti (2016)

Berdasarkan Tabel 18 diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1) Uji t antara  $X_1$  (IPM) dengan Y (Penerimaan Pajak) menunjukkan t hitung = 2,833 sedangkan t tabel ( $\alpha = 0.05$  ; db residual = 8) adalah sebesar

2,306. Karena  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel yaitu  $2,833 > 2,306$  atau  $\text{sig. } t(0,022) < \alpha = 0.05$  maka pengaruh  $X_1$  (IPM) terhadap Penerimaan Pajak adalah signifikan. Hal ini berarti  $H_0$  ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh IPM.

- 2) Uji  $t$  antara  $X_2$  (PDRB) dengan  $Y$  (Penerimaan Pajak) menunjukkan  $t$  hitung = 2,612 sedangkan  $t$  tabel ( $\alpha = 0.05$  ; db residual = 8) adalah sebesar 2,306. Karena  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel yaitu  $2,612 > 2,306$  atau  $\text{sig. } t(0,031) < \alpha = 0.05$  maka pengaruh  $X_2$  (PDRB) terhadap Penerimaan Pajak adalah signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti  $H_0$  ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh PDRB.

## **E. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Pengaruh IPM Terhadap Penerimaan Pajak**

Berdasar hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara signifikan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak yang berarti dengan meningkatnya IPM maka penerimaan pajak akan mengalami peningkatan secara signifikan. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Cholili (2014) dimana IPM mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin dimana penurunan tingkat kemiskinan saat IPM meningkat merupakan indikasi tingginya kualitas sumber daya manusia yang akan berakibat pada meningkatnya produktifitas kerja penduduk. Tingkat produktifitas yang tinggi

akan mempengaruhi pendapatan masyarakat sekaligus pola konsumsi masyarakat. Dalam hal penerimaan pajak, dengan konsumsi yang tinggi akan menyebabkan penerimaan sektor pajak ikut meningkat melalui tingkat konsumsi masyarakatnya.

Penelitian ini membuktikan teori Todaro dan Smith (2011: 59) bahwa Indikator penyusunan IPM yaitu kesehatan dan pendidikan adalah *input* (masukan) bagi fungsi produksi nasional dalam perannya sebagai komponen modal manusia (*human capital*), yang berarti investasi produktif dalam sumber daya manusia. Peningkatan pendapatan akan meningkatkan pengeluaran yang akan berimbas pula pada peningkatan penyerapan dalam sektor perpajakan melalui sektor konsumsi. Todaro dan Smith (2011: 61) menekankan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) memiliki kecenderungan kuat sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita yang memungkinkan negara dapat berinvestasi lebih banyak dalam bidang kesehatan dan pendidikan yang berarti tambahan modal manusia ini mempertinggi produktivitas.

Dalam penelitian ini didapat hasil bahwa IPM memiliki pengaruh yang dominan dalam peningkatan penerimaan pajak, namun tingkat IPM daerah penelitian maupun Indonesia secara keseluruhan masih berada di level menengah. Khusus Provinsi NTB, peringkat IPM secara nasional walaupun menjadi yang paling signifikan peningkatannya, namun posisi secara nasional merupakan salah satu yang terendah. Hal ini disebabkan oleh komponen-komponen penyusun IPM NTB salah satu yang terendah dan berada pada

tingkat di bawah rata-rata nasional seperti yang dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 21: Indikator Pendidikan**

Tahun	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah
2015	13,04 tahun	6,71 tahun
2014	12,73 tahun	6,67 tahun
2013	12,46 tahun	6,54 tahun
2012	12,21 tahun	6,33 tahun
2011	11,97 tahun	6,07 tahun
2010	11,66 tahun	5,73 tahun

Sumber: Statistik Indonesia 2013-2015, data diolah peneliti (2017)

Melihat tabel 21 di atas, kedua indikator pendidikan Provinsi NTB dari tahun ke tahun memang meningkat, namun masih belum mencapai standar maksimal yang ditetapkan. Harapan lama sekolah merupakan komponen yang mempunyai nilai bagus dengan standar maksimal 15 tahun dan pada tahun 2015 sudah berada di atas rata-rata nasional yaitu selama 12,55 tahun. Namun rata-rata lama sekolah berada jauh dari standar yaitu 18 tahun. Rata-rata lama sekolah di NTB juga berada di bawah rata-rata nasional yaitu 7,84 tahun. Hal ini mengindikasikan banyaknya kejadian putus sekolah di NTB. Selain itu, indikator IPM juga disusun berdasarkan tingkat kesehatan yang diukur berdasarkan angka harapan hidup saat lahir yang dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 22. Indikator Kesehatan**

Periode	Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH)
2005-2010	64,4
2010-2015	67,4

Sumber: Statistik Indonesia, data diolah peneliti (2017)

Indikator kesehatan yang diukur berdasarkan AHH dihitung juga per periode. Dalam 2 kurun periode yang dapat di lihat pada tabel 22 diatas per lima (5) tahun, AAH NTB mengalami peningkatan. Namun menurut data, posisi tersebut masih di bawah rata-rata nasional yaitu mencapai 70,78 tahun.

Selain itu, dengan AHH yang demikian, NTB menempati posisi AHH terendah secara nasional. Artinya angka harapan hidup NTB sangat rendah.

Terakhir indikator penyusun IPM dapat dilihat berdasarkan kemampuan daya beli per kapita yang mengindikasikan kehidupan yang layak. Posisi pendapatan per kapita di NTB dapat di lihat dalam tabel berikut:

**Tabel 23. Indikator Kehidupan Layak NTB (Rp)**

Tahun	Pengeluaran per kapita/bulan	Rata-rata Nasional
2015	668499	868.823
2014	636.019	776.032
2013	547.748	703.561
2012	484.661	633.269
2011	444.630	593.664
2010	424.377	494.845

Sumber: Statistik Indonesia 2013-2015, data diolah peneliti (2017)

Secara jumlah, dari tahun ke tahun kemampuan daya beli masyarakat NTB mengalami peningkatan. Namun berdasarkan tabel 23, jika dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran nasional, posisi NTB masih berada di bawah rata-rata nasional. Berdasarkan data, posisi di atas hanya mampu menempati NTB sebagai posisi daya beli yang rendah. Bahkan daya beli NTB ditahun 2011-2013 merupakan 3 terbendah secara nasional. Tahun terakhir, 2015 hanya mampu naik 1 peringkat saja.

Melihat data di atas, apat disimpulkan bahwa posisi IPM NTB masih kalah bersaing dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Hal ini mengindikasikan pemerintah harus lebih menekankan perbaikan pada komponen-komponen pembentukan IPM agar menjadi lebih baik sehingga diharapkan IPM mampu terus meningkat dan memberi efek positif pada

peningkatan pendapatan dan produktivitas masyarakatnya yang akan memberikan dampak positif pada penerimaan pajak daerah NTB.

## **2. Pengaruh PDRB Terhadap Penerimaan Pajak**

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa PDRB secara signifikan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak yang berarti dengan meningkatkan PDRB maka penerimaan pajak akan mengalami peningkatan secara signifikan. Hasil penelitian ini sekaligus mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nalendra (2013) yang menyatakan PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Peningkatan PDRB secara positif mampu meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini mampu menjelaskan teori Soemitro dan Sugiharti (2004) dalam Nalendra (2013) yang menyatakan bahwa pajak ditinjau secara makroekonomi bersumber dari peralihan harta (uang) dari masyarakat/swasta kepada pemerintah dimana semakin banyak harta(uang) yang berasal dari tingkat produktivitas yang diukur dari PDRB daerah akan mampu meningkatkan jumlah pajak daerah.

Selain itu penelitian ini juga mendukung teori Siregar dan Wahyuniarti dalam Cholili (2014) yang menyatakan bahwa ketika perekonomian berkembang di suatu wilayah (negara atau kawasan tertentu yang lebih kecil) terdapat lebih banyak pendapatan untuk dibelanjakan dan memiliki distribusi pendapatan yang baik di antara wilayah tersebut. Dikarenakan PDRB merupakan salah satu indikator produktivitas suatu wilayah serta indikator pertumbuhan ekonomi, maka meningkatnya pendapatan masyarakat akan berdampak pada meningkatnya konsumsi masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan penerimaan pajak dapat diramalkan dengan peningkatan produktifitas dan pendapatan masyarakat yang akan mempengaruhi peningkatan konsumsi masyarakat yang disebabkan oleh kemampuan daerah dalam membayar pajak juga akan meningkat. Berdasarkan hasil tersebut maka pemerintah diharapkan benar-benar memperhatikan tingkat produksi di wilayah masing-masing agar perekonomian daerah dapat terus meningkat, masyarakat akan memiliki peluang kerja yang tinggi dan pendapatan yang tinggi pula sehingga pendapatan daerah dari sektor pajak akan terus meningkat sejalan dengan peningkatan PDRB.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui variabel mana sajakah yang mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak. Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah variabel IPM ( $X_1$ ), PDRB ( $X_2$ ) terhadap variabel terikat yaitu Penerimaan Pajak ( $Y$ ).

Berdasarkan pada hasil penelitian ini, dapat diketahui:

1. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa IPM dan PDRB secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini disebabkan oleh peningkatan IPM dan PDRB NTB dari tahun ke tahun yang juga diikuti oleh peningkatan penerimaan pajak. Namun peningkatan yang ada tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap IPM yang walaupun meningkat setiap tahunnya, namun masih menjadi provinsi dengan IPM yang tergolong rendah. Hal ini karena rata-rata tingkat pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak di NTB masih tergolong rendah dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia.
2. Berdasarkan hasil uji  $t$  didapatkan bahwa variabel IPM mempunyai pengaruh yang paling kuat dibandingkan dengan variabel PDRB. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel IPM mempunyai pengaruh yang dominan terhadap penerimaan pajak. Hal ini disebabkan oleh peningkatan

IPM NTB merupakan salah satu yang paling cepat diantara daerah-daerah lain di Indonesia dengan tidak melihat tinggi rendahnya IPM di tiap provinsi. Bahkan peningkatan IPM NTB di tahun 2014 merupakan yang tercepat di bawah NTT. Ini mengindikasikan bahwa NTB berusaha kuat untuk meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki yang akan berdampak pada peningkatan kemampuan ekonomi daerah.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan maupun bagi pihak-pihak lain yang bersangkutan. Adapun saran yang diberikan, antara lain:

1. Diharapkan kepada pemerintah provinsi NTB untuk mampu memperbaiki komponen-komponen penyusun IPM yang ada di NTB dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak. AHH yang rendah mampu ditingkatkan dengan cara menambah jumlah tenaga kesehatan serta fasilitas kesehatan di pelosok daerah serta memberikan edukasi kepada ibu hamil agar tingkat kematian bayi dapat berkurang dengan cara sosialisasi nutrisi ibu hamil serta pentingnya melahirkan menggunakan jasa kesehatan. Selain itu, untuk memperbaiki nilai rata-rata partisipasi sekolah di NTB, pemerintah hendaknya menjamin anak-anak usia sekolah agar tetap mengenyam pendidikan sehingga tidak ada lagi anak yang putus sekolah. Sedangkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, pemerintah hendaknya menambah dan memperbanyak peluang kerja di daerah, sehingga pengangguran berkurang dan daya beli bertambah.

2. PDRB menurut hasil penelitian juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak walaupun tidak sebesar pengaruh IPM. Melihat kondisi pencari kerja di NTB yang sebagian besar bekerja pada sektor pertanian, perkebunan, perhutanan serta pariwisata, untuk meningkatkan penerimaan pajak maka disarankan kepada pemerintah untuk memperkuat sektor tersebut dengan memaksimalkan potensi alam yang tersedia, mengingat masih dominannya sektor tersebut sebagai mata pencaharian utama masyarakat NTB.
3. Mengingat variabel bebas dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat penting dalam mempengaruhi penerimaan pajak diharapkan hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dengan mempertimbangkan lokasi penelitian lain atau fokus kepada IPM sebagai variabel yang mempengaruhi penerimaan pajak. Selain itu peneliti selanjutnya dapat meneliti hubungan antara PDRB dan IPM dengan memperhatikan dampaknya bagi daerah. Peneliti selanjutnya juga dapat melihat dan mengkaji kebijakan daerah khususnya kebijakan pajak dalam rangka penerimaan daerah melalui peningkatan IPM yang tidak hanya mengalami peningkatan tetapi juga berdampak pada kemajuan daerah secara nyata.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU

- Gemmel, Norman. 1998. *Ilmu Ekonomi Pembangunan Beberapa Survei*. Editor:LP3ES
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Idrus, Muhammad. 2007. *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*. Yogyakarta: UII Press.
- Jhingan, M.L. 2012. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Londong, Ivan. 2005. *World Developmen Report, Iklim Investasi yang Lebih Baik Bagi Setiap Orang*. Jakarta: Salemba Empat
- Nugroho dkk. 2012. *Metode Kuantitatif*. Jakarta. Salemba Humanika
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Priantara, Diaz. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Priyatno, Duwi. 2014. *SPSS 22 Pengolah Data Terpraktis*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Rahardja, Pratama dan Mandala Manurung. 2008. *Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Indonesia.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Bandung: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sanusi, Anwar. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta. Salemba Empat.

- Sarjono, Haryadi dan Winda Julianita. 2011. *SPSS vs LISREL: Sebuah Pengantar, Aplikasi Untuk Riset*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar, Syofian. 2014. *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. 2015. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Indeks.
- Susyanti, Jeni dan Ahmad Dahlan. 2015. *Perpajakan untuk Praktisi dan Akademisi*. Jatim: Empatdua Media.
- Sutanto, Paojan Mas'ud. 2014. *Perpajaka Indonesia (Teori & Aplikasi)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2011. *Pembangunan Ekonomi edisi 11*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widi, Restu Kartiko. 2009. *Asas Metode Penelitian, Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Surabaya: Graha Ilmu

#### **SKRIPSI DAN JURNAL**

- Aprilia, Anggi. 2015. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan*. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Badan Pusat Statistik. 2014. *Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Cholili, Fathkul Mufid. 2014. *Analisis Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin*. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Gresia, Ria. 2010. *Analisis Pengaruh Variabel Produk Domestik Regional Bruto, Angkatan Kerja, Tingkat Suku Bunga Kredit Investasi dan Upah*

*Minimum Kota Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Balikpapan Periode 1993-2007.* Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

Nalendra, Encep Herdiana Rachman. 2013. *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak.* Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.

## PERATURAN

Undang-undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

## INTERNET

Dayli, Investor. 2013. *Penerimaan Pajak Belum Optimal.* Diakses pada 10 Maret 2017 pada <http://www.gpkonsultanpajak.com/penerimaan-pajak-belum-optimal.html>

Kementrian Keuangan. 2016. *Realisasi Penerimaan Negara.* Diakses Pada 18 Agustus 2016 dari <http://www.kemenkeu.go.id/SP/realisasi-pelaksanaan-apbnp-tahun-2015>

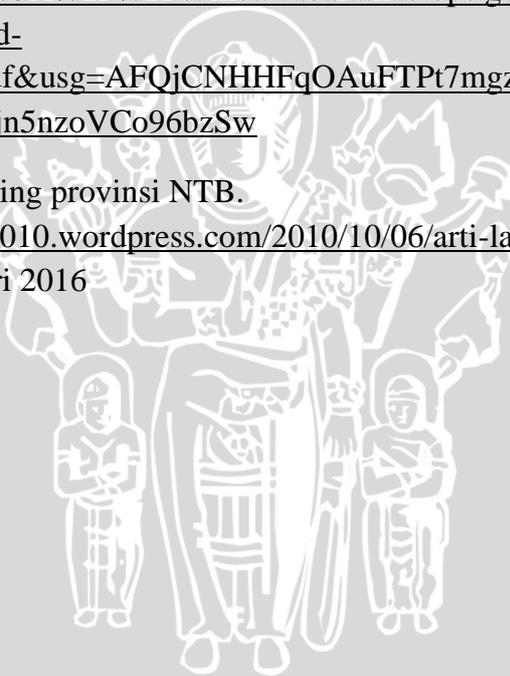
Sa'diah, Halimatus. 2014. *Ini Penyebab Target Penerimaan Pajak Tidak Tercapai.* Diakses pada 10 Maret 2017 pada <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/14/11/20/nfbytq-ini-penyebab-target-penerimaan-pajak-jarang-tercapai>.

**Suryanto. 2014.** *Alokasi Dana Desa Dana Desa Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah ke Desa.* Diakses pada 21 Maret 2017 pada <http://bpkad.natunakab.go.id/index.php/2014-05-21-00-44-45/106-alokasi-dana-desa-dana-desa-bagi-hasil-pajak-dan-retribusi-daerah-ke-desa>.

United Nations Development Programme. 2014. *Human Development Report 2014*. Diakses Pada 15 Agustus 2016 dari <http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hdr/2014-human-development-report.html>

Badan Pusat Statistik. 2015. Berita Resmi Statistik No.13/02/52/Th.IX, 5 Februari 2015. Diakses Pada tanggal 1 dan 24 November 2016 dari <http://ntb.bps.go.id/LinkTableDinamis/view/id/56>, [https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1622\\_pdrb\\_200-2013](https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1622_pdrb_200-2013) , [https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEWjk457I\\_obQAhUmTo8KHwKBAIAQFg\\_gdMAA&url=https%3A%2F%2Fsumbawabaratkab.bps.go.id%2Fwebsite%2Fbrs\\_ind%2FbrsInd-20151221103324.pdf&usq=AFQjCNHFFqOAuFTPt7mgz4TcB55AM3LC\\_Cw&sig2=v4rhxmhjn5nzoVCo96bzSw](https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEWjk457I_obQAhUmTo8KHwKBAIAQFg_gdMAA&url=https%3A%2F%2Fsumbawabaratkab.bps.go.id%2Fwebsite%2Fbrs_ind%2FbrsInd-20151221103324.pdf&usq=AFQjCNHFFqOAuFTPt7mgz4TcB55AM3LC_Cw&sig2=v4rhxmhjn5nzoVCo96bzSw)

Google.2016.Arti lambing provinsi NTB. <https://berugaqelen2010.wordpress.com/2010/10/06/arti-lambang-provinsi-ntb/>.diakses 5 januari 2016



**Lampiran 1. Instrumen Penelitian**

<b>Tahun</b>	<b>IPM</b>	<b>PDRB</b>	<b>Penerimaan Pajak</b>
2015	68,22	Rp 92791555100	Rp 1010655242476
2014	67,73	Rp 75433196970	Rp 904782698514
2013	67,54	Rp 65963913770	Rp 697834322423
2012	66,89	Rp 60848873230	Rp 580615755680
2011	66,23	Rp 56284851230	Rp 506909925653
2010	65,2	Rp 51405875930	Rp 391690341968
2009	64,66	Rp 44014620000	Rp 369172468753
2008	64,12	Rp 35314730000	Rp 294298461219
2007	63,71	Rp 33522230000	Rp 258576863634
2006	63,04	Rp 28596880000	Rp 190504557188,53
2005	62,42	Rp 25682670000	Rp 146981076058

**Lampiran 2. Hasil Analisis Statistik**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.880 <sup>a</sup>	.774	.718	1.520E+011	1.777

- a. Predictors: (Constant), PDRB, IPM
- b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	IPM	.789	1.267
	PDRB	.789	1.267

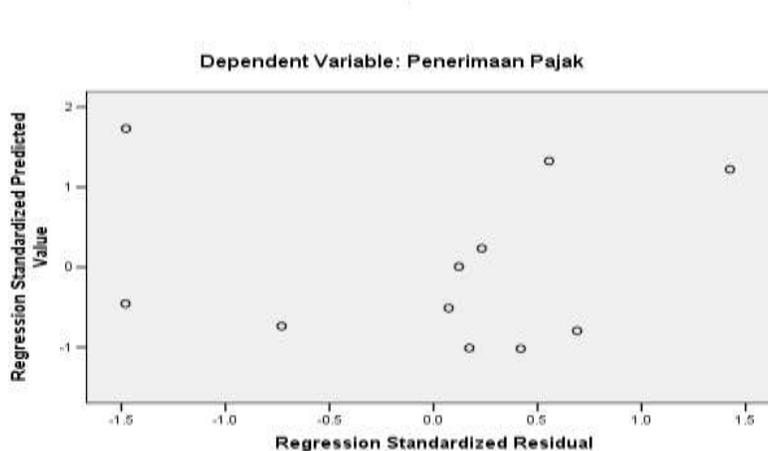
- a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

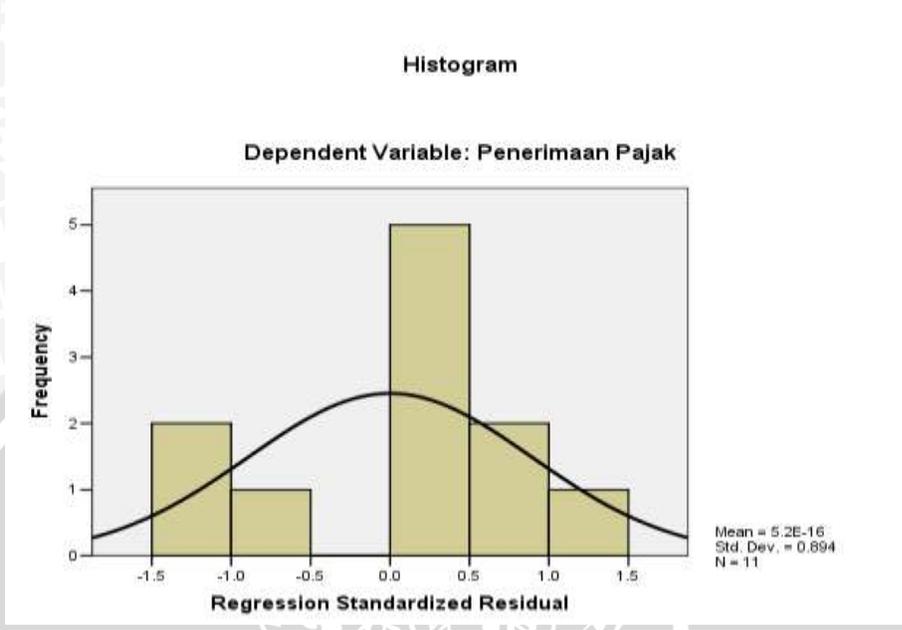
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		11
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000777
	Std. Deviation	1.3594E+011
Most Extreme Differences	Absolute	.260
	Positive	.133
	Negative	-.260
Kolmogorov-Smirnov Z		.862
Asymp. Sig. (2-tailed)		.448

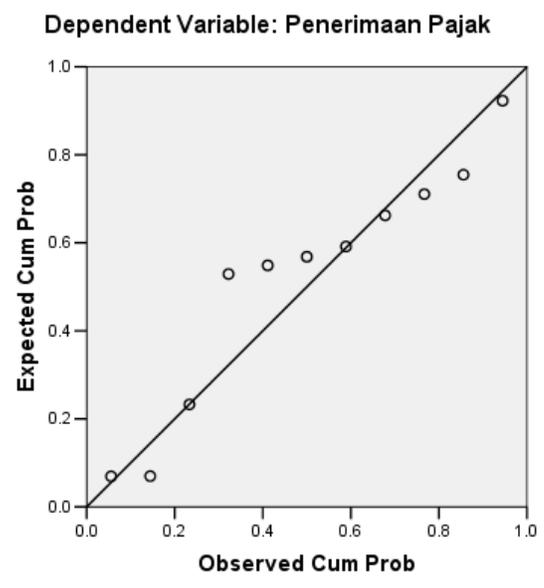
- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

**Scatterplot**





Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



**Lampiran 3. Hasil Regresi Linier Berganda**

**Regression**

**Descriptive Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
Penerimaan Pajak	486547428506.05	286036196317.66030	11
IPM	65.4327	2.00973	11
PDRB	51805399657.2728	21044134339.82914	11

**Correlations**

		Penerimaan Pajak	IPM	PDRB
Pearson Correlation	Penerimaan Pajak	1.000	.763	.740
	IPM	.763	1.000	.459
	PDRB	.740	.459	1.000
Sig. (1-tailed)	Penerimaan Pajak	.	.003	.005
	IPM	.003	.	.078
	PDRB	.005	.078	.
N	Penerimaan Pajak	11	11	11
	IPM	11	11	11
	PDRB	11	11	11

**Variables Entered/Removed**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PDRB, IPM <sup>a</sup>	.	Enter

- a. All requested variables entered.
- b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.880 <sup>a</sup>	.774	.718	1.520E+011	1.777

a. Predictors: (Constant), PDRB, IPM

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6.333828E+023	2	3.167E+023	13.711	.003 <sup>a</sup>
	Residual	1.847842E+023	8	2.310E+022		
	Total	8.181671E+023	10			

a. Predictors: (Constant), PDRB, IPM

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-4851185328019.62	1705003304145.563		-2.845	.022
	IPM	76260285387.5262	26919754386.04389	.536	2.833	.022
	PDRB	6.714	2.571	.494	2.612	.031

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak